



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)**

TAHUN 2005–2025

**Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2009**



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)**

TAHUN 2005-2025

**Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2009**

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TANGGAL 2 MARET 2009**



**PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan tahapan pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien menuju masyarakat yang maju, mandiri, modern, berbudaya, adil dan sejahtera, maka diperlukan adanya rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai visi, misi, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh;
 - b. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2005-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2005-2025.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan tahunan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

S I S T E M A T I K A

Pasal 2

Sistematika RPJPD Tahun 2005-2025, meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum, Prakiraan, dan Isu Strategis
- Bab III : Makro Ekonomi Daerah
- Bab IV : Filosofi, Visi, Misi, Sasaran dan Arah Pembangunan Daerah
- Bab V : Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
- Bab VI : Penutup

BAB III

SASARAN, ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS

Pasal 3

- (1) Pembangunan Daerah dalam RPJPD Tahun 2005-2025 diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi sesuai Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas.
- (2) Rincian Sasaran, Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rincian Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas RPJPD Tahun 2005-2025.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 6

RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, sasaran, arah, tahapan dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RPJPD Tahun 2005-2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



TRI HARJUNISMAJI
NIP. 110 023 446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya adalah wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang bergabung dengan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945, sejak ditetapkan sebagai sebuah Daerah Otonom sudah dinyatakan sebagai sebuah Daerah Istimewa yang ditetapkan melalui “*Piagam Kedudukan*” Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945.

“*Amanat*” Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII yang mengubah peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berisi hal-hal sebagai berikut *pertama*, Negeri Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia, *kedua* Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII memegang kekuasaan pemerintahan di Yogyakarta, dan *ketiga*, kedua pimpinan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh pengakuan negara sebagai daerah istimewa sesuai hak-hak dan asal-usul daerah dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilandasi dengan Filosofi **Hamemayu Hayuning Bawana**, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Makna yang lebih dalam adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam, dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat DIY. RPJPD merupakan perencanaan yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga perumusan visi dan misi juga merupakan produk kolektif *stakeholders*.

Rencana pembangunan jangka panjang mengarah pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya lebih menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah, serta sasaran dan tahapan pembangunan yang akan dicapai juga bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi fleksibilitas yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025 sedangkan periodisasi RPJMD tidak mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 terbagi dalam 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yaitu Lima Tahun Pertama (2005-2009), Lima Tahun Kedua (2010-2014), Lima Tahun Ketiga (2015-2019), dan Lima Tahun Keempat (2020-2024).

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dijadikan pedoman dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Gubernur. RPJMD memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan, Kepala Daerah/Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah/Gubernur berikutnya. Namun demikian, Kepala Daerah/Gubernur berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RPJPD Tahun 2005-2025 adalah untuk:

- mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan
- menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah

- menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
- mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, beberapa Kabupaten/Kota telah menetapkan RPJPD Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah ini tetap mengakui keberadaan RPJPD Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota tersebut. Namun demikian, Peraturan Daerah ini memberikan batasan waktu bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan RPJPD Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota sesuai dengan RPJPD menurut Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 terdiri dari 6 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi, Sasaran, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

DAFTAR ISI

halaman

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025	i
Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Sejarah Terbentuknya Provinsi DIY	1
2. Pengertian RPJPD	2
3. Proses Penyusunan RPJPD	3
B. Maksud dan Tujuan	3
1. Maksud	3
2. Tujuan	3
C. Landasan Hukum	4
1. Landasan Idiil	4
2. Landasan Konstitusional	4
3. Landasan Operasional	4
D. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KONDISI UMUM, PRAKIRAAN, DAN ISU STRATEGIS..	7
A. Gambaran Umum	7
B. Gambaran Bidang	8
1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup	8
2. Kependudukan dan Demografi	12
3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	17
4. Sosial dan Budaya	31
5. Pemerintahan dan Politik	52
6. Prasarana Wilayah	58
7. Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang	65

BAB III	MAKRO EKONOMI	68
BAB IV	FILOSOFI, VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	70
	A. Dasar Filosofi	70
	B. Visi	70
	C. Misi	72
	D. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah	72
	E. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	75
	F. Matrik Filosofi-Visi-Misi-Sasaran-Arah RPJPD Tahun 2005-2025	80
BAB V	TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005–2025	89
	A. Lima Tahun Pertama (2005-2009)	89
	B. Lima Tahun Kedua (2010-2014)	97
	C. Lima Tahun Ketiga (2015-2019)	105
	D. Lima Tahun Keempat (2020-2025)	112
	E. Matrik Tahapan-Prioritas RPJPD Tahun 2005-2025	120
BAB VI	PENUTUP	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Sejarah Terbentuknya Provinsi DIY

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai sistem pemerintahan berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh keturunan Raja Mataram. Bentuk kerajaan tersebut adalah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berdiri tahun 1755 dan Kadipaten Pakualaman yang berdiri tahun 1813. Keduanya oleh Pemerintah Hindia Belanda diakui sebagai kerajaan yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penguasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman, menyatakan bergabung menjadi satu kesatuan sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya sebagai daerah otonom setingkat provinsi, dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Aspek legal yang mendasari hal tersebut adalah:

- a. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
- b. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 (yang dibuat terpisah);
- c. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat dalam satu naskah).

Pada awal kemerdekaan dan masa peralihan kekuasaan, kondisi politik negara RI tidak stabil. Oleh karena itu sejak tanggal 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949, Yogyakarta ditunjuk menjadi ibukota Negara RI, dengan alasan daerah ini relatif aman dan secara *de facto* maupun *de jure* diakui oleh internasional, sedangkan secara yudiris, DIY dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dan secara operasional dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959.

Pada setiap Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX, yang sekaligus sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

2. Pengertian RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan (2005-2025). Di dalamnya memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah. Penyusunan RPJPD mendasarkan pada kondisi obyektif, potensi riil, permasalahan serta kebutuhan nyata daerah yang merangkum seluruh aspirasi masyarakat DIY dengan segala konsekuensi pertumbuhan dan perkembangannya, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi DIY.

3. Proses Penyusunan RPJPD

Proses penyusunan RPJPD, meliputi 3 tahapan utama sebagai berikut:

- a. Penyiapan rancangan awal oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pelibatan berbagai lapisan masyarakat di antaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. Penyusunan rancangan akhir yang selanjutnya diajukan kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dibahas sebagai muatan/lampiran Peraturan Daerah, sampai dengan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah kemudian disahkan dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

RPJPD disusun dengan maksud sebagai alat koordinasi dan "acuan" kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah dalam periode 20 tahun. Dokumen ini juga akan menjadi "acuan" bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menyusun RPJPD Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

RPJPD disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Seluruh upaya dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJPD Tahun 2005-2025 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Landasan Idiil

Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

2. Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

3. Landasan Operasional

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 - 2009;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

D. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJPD merupakan dokumen induk sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun, yang menjabarkan kehendak masyarakat DIY yang merupakan hasil integrasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan regional dan sektoral.

Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat DIY yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

RPJPD dibuat untuk menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lainnya, dan juga dijadikan “acuan” sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Rencana yang termuat di dalam RPJPD merupakan rencana jangka panjang dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJPD Tahun 2005-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Kondisi Umum, Prakiraan, dan Isu Strategis;

Bab III : Makro Ekonomi;

Bab IV : Filosofi, Visi, Misi, Sasaran dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

Bab V : Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Bab VI : Penutup.

BAB II

KONDISI UMUM, PRAKIRAAN, DAN ISU STRATEGIS

A. GAMBARAN UMUM

1. Provinsi DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 7°33'-8°12' Lintang Selatan dan 110°00'-110°50' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km². Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:
 - a. Kota Yogyakarta (luas 32,50 km², terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan);
 - b. Kabupaten Bantul (luas 506,85 km², terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa);
 - c. Kabupaten Kulon Progo (luas 586,27 km², terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa);
 - d. Kabupaten Gunungkidul (luas 1.485,36 km², terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa);
 - e. Kabupaten Sleman (luas 574,82 km², terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa).
2. Lahan pesisir di Provinsi DIY seluas ± 8.250 ha. membujur dari Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul sampai dengan Kabupaten Gunungkidul berpotensi untuk budidaya pertanian dalam arti luas. Dari luasan tersebut, 650 ha. dapat dikembangkan untuk budidaya tambak udang/ikan. Panjang pantai yang membentang dari timur ke barat sepanjang 113 km, dengan potensi perikanan laut, ikan pelagis kecil sebesar 431.000 ton/tahun, sedangkan ikan demersal 135.000 ton per tahun, sedangkan tingkat pemanfaatan per tahun sekitar 22,77%;
3. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian Selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian Timur Laut, Tenggara, Barat dan Barat Laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
 - a. Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut;
 - b. Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara;
 - c. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat;
 - d. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

B. GAMBARAN BIDANG

1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Kondisi Saat Ini:

Kondisi topografi di Provinsi DIY beraneka ragam, mulai dari berbentuk dataran yang datar, lereng pegunungan serta daerah pantai. Timbunan (relief) di Provinsi DIY dicirikan atas dasar lereng dan altitude (ketinggian tempat dari permukaan laut). Menurut altitude dapat dibagi menjadi daerah di bawah 100 m, daerah antara 100-500 m dan daerah antara 500-1.000 m yang sebagian besar berada di Kabupaten Bantul, daerah 1.000-2000 m diatas permukaan laut terletak di Kabupaten Sleman.

Secara fisiografi, DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan wilayah sebagai berikut:

- a. Satuan fisiografi Gunung Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung berapi hingga dataran fluvial gunung berapi termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung berapi merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunung berapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai obyek penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
- b. Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (*limestone*) dan bentang alam *karst* yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (Wonosari Basin) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang;

- c. Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil;
- d. Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan fluvial (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan *marin* dan *eolin* yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan *marin* dan *eolin* di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan gumuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran *fluvial* yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang namun juga banyak terjadi pencemaran lingkungan.

Wilayah DIY mempunyai potensi bencana alam, terutama berkaitan dengan bahaya geologi yang meliputi:

- a. Bahaya alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi;
- b. Bahaya gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pegunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul;

- c. Bahaya banjir, terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul;
- d. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam *karst*;
- e. Bahaya tsunami, berpotensi terjadi di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul, khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut;
- f. Bahaya alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta;
- g. Bahaya gempa bumi, berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempabumi tektonik maupun vulkanik. Gempabumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (*subduction zone*) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Selain itu secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami guncangan akibat gempabumi.

Pengelolaan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup menyebabkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam menipis. Kawasan hutan dengan luas 23,54% dari luas wilayah DIY kurang mencukupi sebagai standar lingkungan hidup. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumberdaya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Untuk itu, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar tidak terjadi krisis sumberdaya alam, khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi.

Laju kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan terus terjadi. Kerusakan sumberdaya alam dan penurunan mutu lingkungan secara drastis tersebut menyebabkan perubahan tatanan dan fungsi lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan munculnya ancaman global seperti perubahan iklim global, rusaknya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya produksi gas rumah kaca.

Prakiraan:

- a. Ancaman berupa bencana alam masih menjadi perhatian yang serius karena jumlah korban, kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana diperkirakan akan semakin tinggi apabila tidak ada upaya untuk melakukan berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana.
- b. Pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi akan meningkatkan eksploitasi sumberdaya alam yang membuka peluang terjadinya kerusakan lingkungan.

Isu Strategis:

- a. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di unit fisiografi Gunung Merapi yang berupa kerucut dan lereng mengakibatkan berkurangnya imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama.
- b. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun.
- c. Kawasan *karst* di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang sangat peka terhadap kerusakan lingkungan. Kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut.
- d. Pencemaran air tanah di sistem Bribin-Baron, Seropan, dan Ngobaran telah meningkat. Apabila kecenderungan penurunan kualitas dan kuantitas air ini terus meningkat, bukan sesuatu yang mustahil air sungai bawah tanah di masa mendatang tidak dapat dikonsumsi lagi.

- e. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan Gunung berapi, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, tsunami, serta kekeringan walaupun tidak dapat diprediksi kejadiannya masih menjadi tantangan di masa mendatang sehingga upaya-upaya penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat bahwa DIY merupakan daerah yang rawan bencana harus terus dilakukan.
- f. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi pengurangan risiko bencana.
- g. Penghargaan, perlindungan dan pelestarian kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- h. Kerjasama seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan swasta) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

2. Kependudukan dan Demografi

Kondisi Saat Ini:

- a. Tahun 2005 Yogyakarta mencatat keberhasilan di bidang kependudukan dalam hal pencapaian angka harapan hidup yang tertinggi di Indonesia yaitu 73,0 tahun. Angka harapan hidup DIY lebih tinggi di banding rerata Indonesia yang nilainya 70,7 tahun. Di antara kabupaten dan kota, Kabupaten Sleman merupakan konsentrasi lansia di DIY. Usia harapan hidup warga Sleman mencapai 74 tahun. Usia harapan hidup yang panjang merupakan representasi banyak faktor antara lain kondisi ekonomi yang menjamin kesejahteraan rumahtangga dan ketercukupan kebutuhan dasarnya, pelayanan kesehatan yang efektif dalam mengatasi penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan yang baik, dan sosio-kultural masyarakat yang menjamin hidup lebih tenteram. Negara-negara maju umumnya mempunyai usia harapan hidup yang tinggi, sehingga dinyatakan bahwa semakin berkembang dan maju suatu masyarakat semakin tinggi usia harapan hidupnya.

Seiring dengan perbaikan dan pengembangan kualitas pembangunan di berbagai sektor, usia harapan hidup di DIY akan semakin meningkat, dan karenanya memerlukan pendekatan pembangunan dengan memberikan perhatian dan pelayanan yang sesuai bagi penduduk usia tua.

- b. Di bidang kependudukan, perwujudan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indeks komposit dari komponen indeks angka harapan hidup, indeks angka melek huruf, indeks rerata lama sekolah dan indeks pengeluaran riil perkapita, dari seluruh provinsi di Indonesia, DIY menempati urutan IPM yang baik yaitu dalam kelompok empat besar.
- c. Dinamika demografi DIY dicirikan oleh kecenderungan semakin stabilnya pertumbuhan penduduk. Hasil Sensus Penduduk (SP) 1971, 1980, 1990, 2000 dan hasil pencatatan tahun 2001- 2004 menunjukkan bahwa meskipun secara absolut jumlah penduduk DIY terus bertambah, namun apabila dilihat dari laju pertumbuhannya selama dua puluh tahun terakhir menunjukkan kecenderungan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun. Laju pertumbuhan penduduk DIY menunjukkan angka di bawah 1% sejak periode 1961-1971, 1971-1980, 1980-1990, 1990-2000 dan 2000-2005. Dibandingkan dengan provinsi lain, laju pertumbuhan tersebut merupakan terkecil di Indonesia. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan program pengendalian kependudukan melalui keluarga berencana dan bergesernya prinsip kependudukan dari masalah kuantitas menuju masalah kualitas kependudukan.
- d. Komposisi penduduk menurut kelompok umur, didominasi kelompok usia dewasa (20-24 tahun) dibandingkan kelompok umur lanjut usia (60 tahun ke atas). Hal ini mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY dan semakin bergesernya piramida penduduk dari struktur muda ke struktur tua. Pergeseran tersebut menunjukkan adanya transisi demografi yang diantaranya dipengaruhi oleh perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat.

- e. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 dan hasil Susenas Tahun 2004 DIY menunjukkan penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan persentase sekitar 50,81% berbanding 49,19%. Besarnya jumlah penduduk perempuan tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan agar bisa berperan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam rangka membangun kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan lingkungan masyarakat.
- f. Berdasarkan tempat tinggal, jumlah penduduk perkotaan lebih besar dibandingkan penduduk pedesaan. Namun hal ini tidak mencerminkan distribusi nyata antara kabupaten dan kota di DIY. Dua wilayah kabupaten di DIY masih dicirikan oleh dominasi penduduk pedesaan. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul penduduk perkotaan lebih kecil dibandingkan penduduk pedesaan.

Kesenjangan dalam ciri urbanisasi antara dua wilayah ini dengan tiga wilayah lainnya cukup besar. Urbanisasi di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta masing-masing adalah sebesar 71,9%, 81,9% dan 100%.

- g. Kontras dalam hal karakter wilayah dan kependudukan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda meskipun orientasinya sama yaitu untuk meningkatkan derajat kesejahteraan lahir dan batin. Wilayah bercirikan pedesaan memerlukan pendekatan pembangunan yang menempatkan komersialisasi dan diversifikasi pertanian sebagai sektor basis, lahan pertanian sebagai aset ekonomi yang perlu dijaga kualitas dan luasannya, serta agropolitan sebagai pola pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Wilayah-wilayah perkotaan menekankan pembangunan yang berorientasi jasa dan perdagangan yang dinamis dan maju. Sektor jasa keempat akan semakin berkembang dan memerlukan dukungan untuk memperkuat identitas DIY sebagai pusat pendidikan dan budaya. Sedangkan jasa kelima perlu didorong berkembang terkait dengan identitas DIY sebagai daerah kunjungan wisata.

- h. Ketimpangan distribusi penduduk DIY semakin terlihat nyata jika dibandingkan antara luas lahan masing-masing wilayah dengan jumlah penduduknya. Dengan luas wilayah 3.185,80 km², rerata kepadatan penduduk DIY sekitar 1.000 jiwa per km². Kepadatan tertinggi di Kota Yogyakarta yang mencapai sekitar 12.000 jiwa per km² sedangkan luas wilayahnya hanya sekitar 1,02 % dari luas DIY. Sebaliknya, kabupaten paling luas yang hampir setengah dari luas DIY (46,63%) yaitu Kabupaten Gunungkidul, mempunyai kepadatan terendah, yaitu sekitar 462 jiwa per km². Permasalahan kependudukan tersebut semakin diperkuat dengan ketimpangan potensi sumberdaya pembangunan wilayah. Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di DIY yang fisiografinya berbukit, kesuburan lahan yang kurang, dan keterbatasan suplai air. Kesejahteraan penduduk di Gunungkidul tercatat terendah di DIY. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang berbeda, yang disesuaikan bagi daerah perbukitan kering termasuk kemungkinan memberikan prioritas pendampingan, subsidi, dan investasi yang lebih besar.
- i. Kecenderungan kondisi kependudukan dan demografi DIY dalam jangka panjang menunjukkan kestabilan dan struktur piramida penduduk yang terbalik. Kondisi demografi ini menuntut penyesuaian pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan penduduk tua dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi produktif, serta pengembangan pelayanan sosial-ekonomi publik yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduk tua.

Prakiraan:

- a. Berdasarkan kelompok umur yang proporsinya lebih besar pada penduduk usia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.
- b. Indeks Pembangunan Manusia tetap menunjukkan peringkat atas.
- c. Jika diasumsikan pertumbuhan dalam jangka panjang rata-rata sebesar $\pm 1\%$ per tahun, maka jumlah penduduk Provinsi DIY pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai $\pm 3.776.500$ jiwa (BPS).

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana di seluruh wilayah terutama di wilayah tertinggal, diharapkan persebaran penduduk akan lebih merata ke seluruh kabupaten/kota. Peningkatan penduduk usia produktif memerlukan dukungan peningkatan mutu SDM melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Isu Strategis:

- a. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
- b. Selain itu terdapat ketimpangan penyebaran penduduk, di satu sisi wilayah perkotaan semakin mengalami peningkatan kepadatan penduduk, sedangkan di wilayah-wilayah perdesaan mengalami perpindahan penduduk menuju kota khususnya kelompok usia muda, produktif, dan lebih terdidik. Beberapa wilayah perdesaan bahkan mengalami pertumbuhan penduduk yang berkurang (depopulasi).
- c. Wilayah-wilayah perdesaan menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumberdaya manusia yang potensial untuk pembangunan wilayah. Pertambahan penduduk di kota juga diakibatkan oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali ke daerahnya sesudah menamatkan pendidikan.
- d. Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota.
- e. Pengendalian distribusi penduduk dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan memberikan penekanan pada pembangunan wilayah-wilayah desa untuk mengurangi kesenjangan dengan pembangunan perkotaan.
- f. Pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang memadai.

3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Kondisi Saat Ini:

a. Investasi, Industri, dan Perdagangan

- 1) Kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh domestik (PMDN) maupun asing (PMA) di DIY dari waktu ke waktu mengalami pasang surut, sesuai dengan perkembangan keadaan politik nasional, kebijakan pemerintah, dan kondisi makro ekonomi nasional. Dalam kurun waktu 2002-2006 jumlah realisasi investasi (PMA dan PMDN) mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun sempat turun pada 2003, investasi dalam negeri naik dari Rp 686 juta (2002) menjadi Rp 28 milyar (2005). Pada 2006 walaupun terjadi gempa bumi (27 Mei 2006), nilai investasi mengalami peningkatan bila dibandingkan 2005, yaitu naik 116,80 %. Investasi asing walaupun mengalami penurunan pada 2004 dan 2005, meningkat dari US\$ 2,6 juta dan Rp 265 milyar (2003) menjadi US\$ 5 juta dan Rp 332 milyar (2006).
- 2) Kegiatan investasi (PMA dan PMDN) yang dilakukan di DIY selama ini merupakan kegiatan usaha yang padat tenaga kerja (*labour intensive*), hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan investasi. Penyerapan tenaga kerja selama 2002-2006 berkisar 191-1.396 orang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh investasi domestik masih perlu ditingkatkan, mengingat penyerapannya hanya sekitar 20-30% dari total penyerapan tenaga kerja investasi (PMA dan PMDN).
- 3) Pencapaian investasi pemerintah dan swasta menunjukkan bahwa investasi lebih banyak mengarah pada pelayanan publik atau pengeluaran konsumsi pemerintah, sedangkan investasi dari sektor swasta masih menunjukkan sedikitnya investasi sektor swasta. Hal ini mengharuskan adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan daya tarik dalam rangka menarik investor dan masyarakat berinvestasi di DIY.

- 4) Dalam bidang industri, secara umum struktur industri di DIY didominasi oleh industri kecil dengan serapan tenaga kerja antara 5-19 orang per unit usaha. Dari total potensi industri sebesar 76.724 unit (2003), 99% (75.956 unit) diantaranya merupakan industri kecil, meskipun industri kecil yang tercatat (berlisensi) baru mencapai 17.492 unit (2003). Pola struktur industri seperti ini sangat berpengaruh terhadap perilaku individu perusahaan dalam berkiprah.
- 5) Dilihat dari klasifikasinya, industri di DIY didominasi oleh industri kerajinan yang meliputi industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya serta industri tekstil pakaian jadi dan kulit yang tersebar di 281 sentra dengan 12.304 unit usaha.
- 6) Potensi Industri Kecil, Menengah dan Besar (IKMB) yang tersebar di wilayah DIY menunjukkan perkembangan fluktuatif. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan jumlah unit usaha sebanyak 78.709 unit usaha (2002), turun menjadi 78.100 unit usaha (2003) dan meningkat menjadi 78.609 unit usaha (2004), dengan pertumbuhan rerata sebesar 0,65 %.
- 7) Penyerapan tenaga kerja IKMB sebanyak 259.812 orang (2002), kemudian turun menjadi 259.102 orang (2003) dan naik 264.217 (2004) dengan pertumbuhan sebesar 1,97%. Perkembangan nilai investasi sektor industri pada tahun 2002 sebesar Rp.845,569 milyar, tahun 2003 sebesar Rp.859,007 milyar sedangkan pada tahun 2004 sebesar Rp.1,031 trilyun mengalami pertumbuhan lebih kurang 20%.
- 8) Industri kreatif cukup berkembang di DIY. Potensi industri kreatif yang berkembang di DIY terbagi dalam bidang industri yang meliputi kerajinan sebanyak 20.293 unit usaha, desain fashion sebanyak 4258 unit usaha, permainan interaktif sebanyak 200 unit usaha perangkat lunak dan 250 unit usaha perangkat keras. Untuk industri kreatif di bidang pariwisata, mempunyai potensi sebanyak ±60 (enam puluh) desa wisata yang tersebar di 4 Kabupaten yang berupa kreasi atraksi wisata, kegiatan interaktif dalam kehidupan masyarakat dan akomodasi yang unik di desa wisata yang diminati oleh wisatawan dalam dan luar negeri.

Selain itu terdapat industri kreatif di bidang kebudayaan yang meliputi 25 *Production House*, seni tari sebanyak 341 kelompok, dan seni drama sebanyak 411 kelompok.

- 9) Pembangunan dalam bidang perdagangan dari sisi perkembangan usaha perdagangan mengalami peningkatan, yang ditunjukkan meningkatnya penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). SIUP meningkat dari 23.999 buah (2002) menjadi 26.597 buah (2004), sedangkan TDP meningkat dari 24.124 perusahaan (2002) menjadi 26.542 perusahaan (2004).
- 10) Meskipun industri kecil mendominasi dari sisi jumlah, namun dari sisi investasi masih tergolong kecil. Perkembangan nilai investasi pada sentra-sentra industri kecil tercatat sebesar Rp. 28 Milyar atau sekitar 3% dari total nilai investasi sektor industri di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada industri skala kecil masih kurang menarik, meskipun nilai produksi dan nilai tambah yang dihasilkan tergolong cukup besar. Dari nilai investasi industri kecil tersebut, mayoritas ditanamkan pada industri kerajinan, sehingga potensi industri ini ke depan perlu terus didorong keberadaannya.
- 11) Perkembangan ekspor menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 14,31% (1993-2004). Komoditi ekspor utama adalah mebel kayu, pakaian jadi tekstil, kulit disamak, sarung tangan kulit, lampu dan produk tekstil lainnya, tetapi ekspor tersebut lebih mengarah pada perpindahan barang antar provinsi, sedangkan ekspor yang mengarah ke luar negeri masih sedikit. Adapun perkembangan impor cenderung mengalami penurunan. Seperti juga ekspor, impor DIY sebagian besar berasal dari dalam negeri (antar provinsi) sedangkan impor dari luar negeri menunjukkan *trend* yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang kecil. Komoditi utama impor adalah obat penyamak kulit, bahan baku susu, kapas, kulit disamak dan komoditi lain.

b. Pertanian

- 1) Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian daerah melalui sumbangannya terhadap PDRB, penerimaan ekspor, penyediaan tenaga kerja, kesempatan kerja, mendukung pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penyediaan pangan daerah. Selain sumbangan tersebut, sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam memperkuat keterkaitan antar industri, konsumsi dan investasi.
- 2) Kontribusi sektor pertanian (termasuk perikanan dan kehutanan) terhadap PDRB selama sepuluh tahun terakhir rerata sebesar 16,33 % (terbesar ketiga setelah sektor jasa dan perdagangan). Namun demikian, tingkat pertumbuhan sektor ini relatif kecil, yakni 0,92% per tahun. Jumlah rumah tangga pertanian selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 9,32%. Proporsi RT pertanian terakhir menunjukkan 47,17% atau 472.082 RT. Dari jumlah tersebut sebesar 80,29% (374.811 RT) sebagian besar merupakan petani gurem (RT pertanian dengan luas kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar). Apabila diukur dari kesejahteraan, nilai tukar (*terms of trade*) petani di DIY dalam sepuluh tahun terakhir meningkat dari 96,9% menjadi 133,3% (tertinggi di P. Jawa).
- 3) Perkembangan produksi tanaman pangan pada sebelas tahun terakhir, ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan. Komoditas tanaman pangan yang mengalami peningkatan adalah padi (0,53%), jagung (0,58%), kacang tanah (1,1%), kacang hijau (1,71%), dan ubi kayu (1,11%). Komoditas tanaman pangan yang mengalami penurunan adalah kedelai, ubi jalar dan cantel. Komoditas sayuran yang mengalami peningkatan signifikan adalah kentang dan kacang merah (di atas 100%), tomat (41,92%) dan buncis (47,04%).
- 4) Penyusutan lahan pertanian akibat pengalihan fungsi lahan pertanian ke fungsi non pertanian. Lahan sawah mengalami laju penurunan sebesar 0,27% per tahun, sedangkan lahan bukan sawah mengalami laju penyusutan sebesar 1,62% per tahun.

c. Ketahanan Pangan

- 1) Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik mutu dan jumlahnya, aman, merata dan terjangkau. NBM (Neraca Bahan Makan) yang merupakan gambaran penyediaan pangan secara utuh dari komoditas tanaman pangan, ternak, ikan dan perkebunan mulai dari produksi, pengadaaan dan penggunaannya sehingga tersedia untuk dikonsumsi dalam bentuk energi.
- 2) Ketersediaan energi Provinsi DIY saat ini sebesar 3.085 kkal/kapita/hari sedang standar Nasional adalah 2.500 kkal/kapita/hari sehingga ditinjau dari sisi energi untuk Provinsi DIY sudah terpenuhi. Apabila dilihat dari keanekaragaman pangan menunjukkan skor 86,5% dengan standar yang ditetapkan 100%. Tahun 2005 standar ketersediaan pangan dicerminkan oleh ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kapita/hari; ketersediaan protein 57 g/kapita/hari; norma kecukupan gizi berdasarkan standar PPH >1.907,6/kkal/kapita/hari, konsumsi energi minimum 1500 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 62,4 g/kapita/hari, dan kualitas konsumsi pangan mendekati skor PPH 85,7%.

Angka konsumsi energi di DIY sudah melampaui standar, yaitu sebesar 1.835,93 kkal/kapita/hari sedangkan angka konsumsi protein, masih belum memenuhi angka standar karena baru mencapai angka 51,04 g/kapita/hari.

d. Perikanan dan Kelautan

- 1) Produksi ikan konsumsi di DIY selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir meningkat rerata 9,9% pertahun karena terjadinya peningkatan teknologi dan SDM nelayan maupun cara pembudidayaannya.
- 2) Produksi benih ikan dan udang selama sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 27,81% pertahun. Sedangkan produksi ikan hias selama sepuluh tahun terakhir meningkat sebesar 37,54% per tahun. Hal ini terutama disebabkan oleh berkembangnya pembudidayaan ikan hias, kemajuan teknologi, serta peluang pasar.

Untuk ikan hias laut mengalami sedikit penurunan sebesar 5,22% pertahun yang disebabkan oleh kurangnya penerapan teknologi produksi dan produksi hanya diperoleh dari hasil tangkapan.

- 3) Konsumsi ikan per kapita selama sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 5,71% pertahun. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap nilai gizi pada komoditas perikanan meningkat. Produksi induk ikan selama sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 3,96 % pertahun. Hal ini disebabkan karena optimalisasi fungsi BBI (Balai Benih Ikan) sebagai produsen calon induk.

e. Perkebunan dan Kehutanan

- 1) Pemanfaatan hutan ditinjau dari fungsi sosial, budaya, ekonomi maupun lingkungan, diupayakan secara sinergis untuk dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan luas sebesar 74.992,96 Ha (23,54% dari luas DIY) yang terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat, hutan di DIY belum memenuhi fungsi ekologis ideal bagi kehidupan yang diperkirakan minimal sebesar 30% dari keseluruhan luas suatu wilayah.
- 2) Pembangunan hutan tetap diarahkan dalam rangka peningkatan perlindungan hutan dan perbaikan ekosistem, antara lain merubah fungsi hutan menjadi kawasan lindung, seperti dalam bentuk Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Hutan Raya Bunder, dan lain-lain dengan selalu memperhatikan kebutuhan produktif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lahan hutan.
- 3) Sektor perkebunan selama sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan luas lahan dan produksi. Luas areal komoditas perkebunan mengalami peningkatan sebesar 14,25 %, terutama pada areal komoditas kelapa, jambu mete dan tembakau. Produksi perkebunan juga mengalami peningkatan sebesar 3,78 %, terutama komoditas kelapa, jambu mete, kakao dan tembakau.

Untuk komoditas pangan (gula), walaupun penambahan areal tebu belum mengalami peningkatan yang berarti tetapi produksi yang dicapai sudah meningkat. Peningkatan ini sebagai dampak dari pemanfaatan bibit tebu berkualitas dan perbaikan teknik budidaya tanaman.

- 4) Di wilayah DIY telah dikembangkan komoditas jarak pagar dengan luas areal mencapai 268 Ha yang dimanfaatkan untuk mengembangkan komoditas bahan bakar nabati, sebagai alternatif bahan bakar minyak.
- 5) Untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani telah dikembangkan aneka produk olahan perkebunan, seperti kopi bubuk, kacang mete, tembakau rajangan, *virgin coconut oil* (VCO), gula semut, minyak atsiri cengkeh, dan lain-lain disamping produk primer produksi perkebunan.

f. Pariwisata

- 1) Pariwisata memiliki sumbangan paling besar terhadap PDRB melalui sektor perdagangan, perhotelan, restoran, dan jasa-jasa lainnya. Jasa perhotelan yang paling dominan di antara 4 (empat) sektor tersebut.
- 2) Ketersediaan aset pariwisata yang memadai berupa wisata alam, wisata budaya, wisata pendidikan dan wisata minat khusus mudah dijangkau dan dilengkapi fasilitas hotel, penginapan, MCK umum, warung makan, restoran.
- 3) Meningkatnya minat pelajar di luar DIY untuk berkunjung melihat obyek wisata DIY karena citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya.
- 4) Kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki aset-aset pariwisata dan penerimaan wisatawan masih rendah.
- 5) Pelaku pariwisata kurang profesional dan kurang inovatif.
- 6) Kurang berkembangnya kesenian rakyat yang dikemas untuk pertunjukan di hotel berbintang.

g. Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Kebutuhan energi di DIY dipenuhi oleh energi listrik, minyak tanah, premium, solar dan LPG. Rasio elektrifikasi DIY rata-rata sebesar 73,51%, dengan rasio tertinggi di Kabupaten Sleman sebesar 83,49% dan rasio terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 59,25%. Wilayah yang belum dialiri listrik sebagian besar merupakan wilayah yang secara teknis dan ekonomis sulit dijangkau. Kebutuhan energi minyak tanah, premium, solar dan LPG meningkat setiap tahun, pada tahun 2005 mencapai 610.265 kilo liter, dengan permintaan energi terbesar berasal dari premium sebesar 343.804 kilo liter.
- 2) DIY memiliki berbagai jenis sumberdaya mineral dalam bentuk bahan galian golongan B dan C yang sangat terbatas jumlahnya. Bahan galian yang ada memiliki nilai ekonomis, seperti batu andesit, sirtu, batu kapur/batu putih, *bentonit*/abu bumi, tanah liat, *feldspar/kaolin*, *zeolit*, tanah urug, breksi/batu apung. Bahan galian golongan B terdiri dari pasir besi (Fe), *mangan* (Mn), *barit* (Ba), dan emas (Au) terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan sumberdaya mineral ini, selain merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan, juga merupakan sumber ancaman bagi perusakan lingkungan.

Prakiraan:

a. Investasi, Industri, dan Perdagangan

- 1) Dalam 20 tahun ke depan, investasi ke DIY baik oleh pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat diperkirakan akan meningkat. Salah satu tolok ukur peningkatan nilai investasi ditentukan dari prakiraan Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan mencapai angka sebesar US\$ 504,44 juta dan PMDN Rp 3,6 trilyun. Beberapa hal yang mempengaruhi kondisi tersebut sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya infrastruktur antara lain akses transportasi, komunikasi dan informasi antar wilayah;
 - b) Menguatnya citra investasi di Yogyakarta;

- c) Terbentuknya jaringan kerjasama antar negara baik pemerintah maupun dunia usaha (swasta) yang berminat dengan potensi investasi yang dimiliki DIY;
 - d) Terjadinya pembagian kewenangan perijinan oleh pusat kepada daerah;
 - e) Meningkatnya sistem pelayanan dengan terwujudnya Pelayanan *Private Client Service* (PCS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pola *One Stop Service* (OSS);
 - f) Terbukanya kemungkinan penerbitan obligasi daerah.
- 2) Industri Kreatif yang tercatat (berlisensi) diharapkan menjadi lebih kokoh sebagai penopang perekonomian daerah. Industri pengolahan baik industri mikro, kecil maupun menengah di DIY akan terus berkembang dalam menciptakan nilai tambah melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan serapan tenaga kerja antara 5-20 orang per unit usaha. Industri kreatif bidang Indagkop mampu menyerap tenaga kerja 64.567 orang, desain fashion 21.241 orang, Industri kreatif bidang pariwisata 1200 orang tersebar di 4 kabupaten, bidang kebudayaan rumah produksi sebanyak 150 orang, seni tari sebanyak 3.410 orang. Seni drama sebanyak 14.385 orang.
- 3) Perdagangan antar wilayah dan perdagangan internasional yang dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah di DIY diperkirakan akan semakin meningkat baik dari jumlah maupun nilai perdagangan. Total realisasi ekspor diperkirakan sebesar US\$ 202,31 juta dengan asumsi terjadi peningkatan 3,9% setiap tahunnya, realisasi impor diperkirakan sebesar US\$ 130,84 juta dengan asumsi terjadi penurunan 17,2% setiap tahunnya.

b. Pertanian

- 1) Sektor pertanian masih tetap menjadi sektor andalan dalam pembentukan struktur perekonomian DIY. Selain itu memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung berupa efek pengganda, yaitu keterkaitan input output antar industri, konsumsi dan investasi.

Pada masa krisis, sektor pertanian telah terbukti lebih tangguh dibanding sektor lain sehingga berperan sebagai penyangga pembangunan. Peran tersebut terutama dalam penyediaan kebutuhan pangan pokok, perolehan devisa, penyedia lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan petani diukur dari, nilai tukar (*terms of trade*) petani di DIY yang diperkirakan meningkat 0,75%.

- 2) Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, akan mendorong kegiatan di bidang pertanian mengarah pada usaha revitalisasi pertanian melalui peningkatan intensifikasi lahan, diversifikasi produk yang bernilai ekonomis tinggi dan industrialisasi di bidang pertanian.

c. Ketahanan Pangan

- 1) Ketersediaan kebutuhan energi dan Pola Pangan Harapan sesuai dengan standar nasional masih stabil dengan jumlah energi ideal sebesar 2.200 kkal. Hal ini ditunjukkan dalam rincian kelompok pangan padi-padian sebesar 50%, umbi-umbian 6%, pangan hewani 12%, minyak dan lemak 10%, buah/biji berminyak 3%, kacang-kacangan 5%, gula 5%, sayur dan buah 3%, lain-lain sebesar 3%.
- 2) Semakin tingginya alih fungsi lahan akan menjadi kendala dalam kecukupan kebutuhan pangan selain pemantauan terhadap distribusi pangan dan juga kemampuan masyarakat menjangkau pangan.
- 3) Dampak negatif penggunaan bahan *addictive* pada makanan akan mempengaruhi mutu dan keamanan pangan di masa depan.

d. Perikanan dan Kelautan

- 1) Pembangunan kelautan dan perikanan akan bertumpu pada pengembangan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan permintaan pasar yang besar.
- 2) Hasil produksi perikanan diperkirakan akan meningkat rata-rata sebesar 11,2% per tahun.

- 3) Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta luasnya penyebaran informasi, mutu SDM dalam usaha dan budidaya perikanan diperkirakan akan semakin meningkat.
- 4) Hasil olahan perikanan diperkirakan akan meningkat rata-rata sebesar 7,9% per tahun dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang.

e. Kehutanan dan Perkebunan

Produksi dan produktifitas tanaman, peningkatan mutu hasil, pengembangan aneka produk olahan serta penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani yang produktif di dalam melaksanakan agribisnis perkebunan diperkirakan akan meningkat.

f. Pariwisata

- 1) Pariwisata di DIY diperkirakan akan berkembang menjadi tujuan wisata unggulan yang didukung oleh meningkatnya jaringan transportasi dan infrastruktur antarwilayah, tersedianya fasilitas dan akomodasi yang lebih beragam serta bermutu.
- 2) Situasi Indonesia yang kurang kondusif menyebabkan Wisatawan Mancanegara (wisman) enggan berkunjung ke DIY khususnya wisman dari Belanda, Jerman, Inggris, Itali, Perancis, Jepang, Taiwan, Korea, Hongkong, Cina dan Thailand.
- 3) Peningkatan pelaku pariwisata berjiwa profesional yang handal dan inovatif.
- 4) Membangun masyarakat DIY untuk kesadaran rasa memiliki tentang kepariwisataan.
- 5) Peningkatan pembangunan kawasan wisata baik alam, budaya, minat khusus, dan alternatif.
- 6) Peningkatan jejaring kepariwisataan.

g. Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di daerah yang semakin meningkat, menuntut ketersediaan infrastruktur khususnya kebutuhan listrik. Kebutuhan listrik di wilayah DIY dapat dipenuhi dengan memanfaatkan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan, seperti mikrohidro (air), tenaga surya, tenaga angin, tenaga sampah dan tenaga biogas.
- 2) Dalam bidang sumberdaya mineral, eksploitasi bahan galian dilakukan dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan.

Isu Strategis:

a. Investasi, Industri, dan Perdagangan

- 1) Investasi
 - a) Perlu diwujudkan “Insentif Investasi” melalui peningkatan iklim investasi dalam rangka mempertahankan investor yang sudah ada.
 - b) Mendatangkan investor baru dan dalam rangka menjawab tantangan persaingan global, melalui langkah-langka konkrit.
 - c) Peningkatan kualitas SDM petugas.
 - d) Perubahan metode promosi.
 - e) Fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap infrastruktur pendukung investasi.
- 2) Industri
 - a) Penataan sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b) Peningkatan pemasaran baik dari segi promosi, jaringan dan fasilitas bagi koperasi dan para pengusaha kecil.
 - c) Optimalisasi pembinaan manajemen usaha bagi koperasi dan pengusaha kecil.

d) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), permodalan, sarana penunjang (teknologi) untuk pengembangan desain dan inovasi produk serta jaringan pemasaran dan promosi.

3) Perdagangan

- a) Peningkatan jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas khususnya bagi koperasi dan para pengusaha kecil.
- b) Optimalisasi lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- c) Ketergantungan bahan baku/penolong impor.
- d) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor.
- e) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri.
- f) Peningkatan kualitas produk guna mengantisipasi membanjirnya produk dari negara lain.

b. Pertanian

- 1) Pengembangan agribisnis dan penguatan jejaring untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- 2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penguatan sistem pertanian.
- 3) Penguatan kelembagaan petani pangan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani.
- 4) Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

c. Ketahanan Pangan

- 1) Krisis ekonomi global yang bisa berdampak pada krisis pangan.
- 2) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok.
- 3) Optimalisasi pemantauan terhadap bahan makanan.
- 4) Peningkatan kualitas produk pangan.

- d. Perikanan dan Kelautan
 - 1) Peningkatan teknologi produksi dan produktivitas perikanan serta profesionalisme SDM dalam bidang perikanan dan kelautan.
 - 2) Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan untuk masyarakat.
 - 4) Konsumsi ikan untuk pemenuhan gizi masyarakat.
 - 5) Peningkatan sistem pemasaran.

- e. Kehutanan dan Perkebunan
 - 1) Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan.
 - 2) Pembangunan hutan diarahkan untuk peningkatan perlindungan hutan dan perbaikan ekosistem dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan.
 - 3) Pengembangan agribisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk DIY.
 - 4) Pemantapan struktur perkebunan melalui pengelolaan dari hulu-hilir termasuk peningkatan mutu SDM.
 - 5) Pengelolaan sumberdaya hutan secara efisien dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
 - 6) Peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani dari pengelola hutan dan perkebunan.
 - 7) Mengembalikan fungsi lahan hutan untuk memenuhi fungsi ekologi yang ideal.

- f. Pariwisata
 - 1) Penguatan sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata.
 - 2) Memperkuat daya dukung dan daya saing pariwisata.
 - 3) Peningkatan atraksi/sajian wisata di obyek-obyek wisata.
 - 4) Menciptakan suasana kondusif akibat dari isu politik, keamanan dan kesehatan.

g. Energi dan Sumberdaya Mineral

- 1) Pemenuhan kebutuhan energi di DIY diupayakan melalui upaya penciptaan energi baru yang diperbarukan, misalnya pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pemasangan pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga biogas.
- 2) Antisipasi terhadap ketersediaan energi melalui gerakan hemat energi.
- 3) Pemanfaatan sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

4. Sosial dan Budaya

Kondisi Saat Ini:

a. Sosial

- 1) Berbagai upaya pembangunan kesejahteraan sosial selama ini telah dilakukan untuk dapat menuntaskan masalah kesejahteraan sosial. Namun upaya tersebut menghadapi tantangan balik dari berbagai faktor yang mengakibatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial cenderung meningkat. Faktor ekonomi yang masih terasa dampaknya terhadap menurunnya derajat kesejahteraan sosial-ekonomi di DIY adalah krisis moneter pada pertengahan tahun 1998 kemudian diikuti oleh kenaikan BBM. Faktor alam yang berpengaruh besar menggoyahkan seluruh sendi kehidupan masyarakat DIY dan menurunkan derajat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adalah bencana gempa bumi 2006. Faktor pengaruh terhadap kesejahteraan sosial yang berlangsung menerus dan semakin meningkat intensitasnya adalah globalisasi yang menggoyahkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat melalui pergeseran dan penyimpangan nilai, norma, gaya, dan orientasi hidup khususnya kelompok pemuda dan remaja.

- 2) Peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di DIY tersebut ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, anak terlantar, anak jalanan, tuna susila, pengemis, gelandangan, penyandang cacat, eks-penderita psikotik, eks-penderita penyakit kronis, korban penyalahgunaan obat/napza, pemulung, bekas napi, lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga bertempat tinggal di daerah rawan bencana, korban bencana alam, korban bencana sosial, anak nakal, pekerja migran, dan korban tindak kekerasan.
- 3) Potensi lembaga dan organisasi serta infrastruktur untuk penanganan dan pengelolaan masalah kesejahteraan sosial yang tersedia masih kurang memadai dalam hal jumlah, cakupan, maupun kinerja. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya memerlukan pembinaan yang berkelanjutan hingga menumbuhkan budaya tanggap dini masalah kesejahteraan sosial dan mampu mengembangkan kemandirian dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial-ekonomi di masyarakat lingkungannya. Berbagai kelompok dan organisasi sosial, Karang Taruna, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, kader rehabilitasi berbasis masyarakat, Satgasos Penanggulangan Bencana Alam, maupun relawan sosial (pekerja sosial masyarakat) masih memerlukan penguatan komitmen, dan profesionalitas, serta kelengkapan instrumen dan fasilitas untuk berperan optimal dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

b. Kesehatan

- 1) Pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan dalam rangka mendukung program Indonesia Sehat 2010 dan mewujudkan Yogyakarta Sehat 2005 dikatakan cukup berhasil, yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator kesehatan sebagai berikut: *Infant Mortality Rate* (IMR) 23,53 perseribu kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan 110 perseratus ribu kelahiran hidup dan umur harapan hidup rata-rata 70,25 tahun.

Indikator tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat nasional, yaitu IMR 54 perseribu kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan 340 perseratus ribu kelahiran hidup dan umur harapan hidup rata-rata 66,6 tahun.

- 2) Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat DIY berakibat meningkatnya penyakit degeneratif atau penyakit usia lanjut dan penyakit menular tertentu, seperti TBC dan Demam Berdarah *Dengue* (DBD) atau *Dengue Haemorrhagic Fever* (DHF).
- 3) Krisis ekonomi belum dapat teratasi dengan tuntas menimbulkan penurunan derajat kesehatan masyarakat sehingga masalah klasik seperti diare, pneumonia dan penyakit kekurangan gizi juga meningkat.

Mengenai ketersediaan sarana kesehatan dapat dikatakan cukup memadai baik berupa Rumah Sakit, Puskesmas Non Tempat Tidur (TT), Puskesmas TT maupun Polindes, sedangkan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada secara umum dapat mencukupi. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah tenaga bidan, perawat, ahli gizi dan ahli sanitasi yang secara kuantitas masih jauh dari mencukupi.

- 4) Prioritas penanganan kesehatan masyarakat adalah DBD, TBC, penyakit degeneratif, malaria, kekurangan gizi, angka kematian ibu dan angka kelahiran bayi. Kondisi kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut balita dengan status gizi buruk sebesar 11%, kecamatan bebas rawan gizi sebesar 85 %, penduduk yang bergizi buruk sebesar 0,35%, status gizi kurang 5,25% dan status gizi baik sebesar 94,4%. Sedangkan pada tahun 2003 angka kematian bayi sebesar 15,53 perseribu kelahiran hidup, angka kematian balita sebesar 45,0 perseribu kelahiran hidup, angka kematian ibu sebesar 110 perseratus ribu kelahiran hidup. Berdasarkan kelompok usia tingkat kejadian, anemia paling tinggi dimulai pada usia 8 tahun sebesar rata-rata 12%.
- 5) Kesehatan lingkungan juga masih memerlukan perhatian terutama yang berkaitan dengan air bersih, rumah sehat dan kesehatan tempat-tempat umum.

Kondisi rumah sehat di Provinsi DIY sebesar 70 % dan tempat-tempat umum sebesar 75%, sedang keluarga dengan akses air bersih sebesar 57,5%. Dari sisi perilaku hidup masyarakat, maka rumah tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 60% dan 30% penduduk yang memanfaatkan Posyandu Purnama dan Mandiri.

c. Pendidikan

- 1) Secara historis DIY dikenal sebagai pusat pendidikan dan daerah tujuan pendidikan di tingkat nasional. Di masa penjajahan Belanda, DIY sudah menjadi pusat pendidikan dengan adanya sekolah-sekolah, seperti MULO dan HIS.

Keberadaan pusat pendidikan di DIY telah berperan penting dalam mendorong lahir dan tumbuhnya pergerakan-pergerakan kebangsaan, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarikat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), Pesantren Krapyak (1919), Perguruan Taman Siswa (1922) yang kiprah kegiatannya mempunyai peran penting dalam perintisan dan pengembangan pendidikan. Demikian pula peran Kraton Yogyakarta melalui Sultan Hamengku Buwono IX yang telah berjasa dalam mendukung pendirian dan penyediaan fasilitas kraton sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas tertua di Indonesia. Identitas DIY sebagai pusat pendidikan terus berlanjut ditandai dengan berkembangnya sekitar 150 lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta.

Pelatihan dan kursus-kursus dalam berbagai bidang ilmu dan ketrampilan berkembang di DIY. Keberhasilan DIY mempertahankan identitas sebagai daerah tujuan pendidikan nampak dari banyaknya masyarakat luar provinsi yang bersekolah di DIY, sehingga DIY menjadi representasi miniatur kehidupan nasional. Minat mahasiswa dari luar negeri untuk belajar dan melakukan penelitian di DIY menunjukkan adanya peluang bagi terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan yang dikenal di tingkat global.

- 2) Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, ditengarai terdapat kecenderungan penurunan minat belajar ke DIY yang antara lain disebabkan oleh berkembangnya pendidikan di daerah lain.
- 3) Predikat Yogyakarta yang mempunyai kultur pendidikan tersebut menghadapi kendala yang dapat menurunkan citra, terutama adanya kasus-kasus penyimpangan moralitas pelajar dan mahasiswa seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan penyimpangan seksualitas, kriminalitas dan perkelahian, dan lain-lainnya. Hal-hal tersebut terjadi juga di daerah lain, namun bagi DIY yang telah dikenal dengan kultur dan tata-krama yang kondusif bagi pendidikan, penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak menurunkan reputasinya.
- 4) Dari segi perluasan dan pemerataan pendidikan dapat dikatakan bahwa perkembangan pendidikan di DIY saat ini telah mencapai angka yang tinggi. Berdasarkan persentase penduduk menurut ijazah dan STTB tertinggi yang dimiliki, DIY menduduki peringkat kedua di bawah DKI Jakarta, yaitu sebesar 33,98 % (2004).
- 5) Untuk anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan telah mencapai 63,24% (2004). Angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 85,8 % Penduduk buta aksara sebesar 14,2 % yang sebagian besar berusia 45 tahun ke atas.
- 6) Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) dalam mengikuti layanan perawatan dan pendidikan pra-sekolah sudah mencapai persentase yang tinggi, yaitu 70,03% (2004), bahkan banyak yang sudah masuk Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 7) Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga telah mencapai persentase yang tinggi, dengan nilai capaian: APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 105,82%, APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 101,25% dan APS penduduk usia 16-18 tahun sebesar 79,89 % (termasuk yang sudah kuliah). APS anak usia 7-12 tahun, APS anak usia 13-15 tahun dan APS anak usia 16-18 tahun tersebut di atas telah melampaui ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan persentase masing-masing sebesar 95%, 95% dan 60%.

- 8) Dari segi kualitas pendidikan, pendidikan di TK/RA telah berhasil membekali lulusannya sehingga lebih siap mengikuti pendidikan di SD/MI, meskipun untuk masuk SD/MI tidak harus masuk TK/RA lebih dahulu.
- 9) Kualitas pendidikan SD/MI secara umum sudah memadai yang ditunjukkan dengan hasil tes kemampuan dasar siswa kelas 3 SD yang dilaksanakan secara sampel terhadap kemampuan membaca, menulis dan berhitung rata-rata mencapai angka 75,00 (2004), sedangkan hasil tes daya serap kurikulum siswa kelas 6 SD pada mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS rata-rata mencapai angka 64,81.
- 10) Pendidikan SMP ditunjukkan dengan hasil ujian nasional yang sejak lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun 0,20 dengan capaian nilai rata-rata 6,82 (2004), sedangkan kualitas pendidikan menengah ditunjukkan dengan rata-rata nilai ujian nasional SMA yang sejak lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun 0,27, dengan capaian nilai rata-rata 6,77 (2004) dan SMK yang sejak tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun 0,62, dengan capaian nilai rata-rata 6,36 (2004).
- 11) Dari segi daya saing pendidikan, DIY telah berhasil meraih prestasi di berbagai kejuaraan bidang pendidikan, baik tingkat nasional maupun internasional. Tahun 2004 beberapa prestasi di tingkat internasional antara lain: Juara III Olimpiade IPA SD, Juara III Olimpiade Kimia SMA, Juara Harapan I *Cabinet Making* pada *Asean Skill Competition*, sedangkan di tingkat nasional tahun 2004 meraih Juara II Lomba Lukis TK, Juara III Lomba Cerita Bergambar TK, Juara I Lomba Prestasi SD, Juara III Olimpiade Astronomi SMP, Juara I dan II Olimpiade Matematika SMA, Juara III Olimpiade Biologi SMA, Juara II dan III Olimpiade Komputer SMA, Juara I dan II Olimpiade Kimia SMA, Promosi Kompetensi Siswa SMK meraih medali emas: 3, medali perak: 8, medali perunggu: 4, Juara I Lomba Kreativitas Guru IPS, Juara II Lomba Inovasi Pembelajaran Biologi, Juara II dan III Lomba Karya Inovatif Mahasiswa, Juara I, II, III Lomba Karya Tulis Mahasiswa, Juara I *Innovation Technology Contest*.

Di samping itu dalam Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (POPNAS) tahun 2003 meraih urutan VIII dengan mengumpulkan 6 medali emas, 9 perak, dan 13 perunggu.

- 12) Peranserta pemuda di berbagai bidang pembangunan dan olah raga sudah mulai terlihat namun belum optimal.

d. Kebudayaan

- 1) Nilai-nilai budaya seperti bahasa dan sastra Jawa, etika, norma, upacara tradisional/adat istiadat, busana, seni pertunjukan, seni arsitektur, karawitan, lukisan dan kehidupan adat tradisi serta seni budaya lahir, tumbuh dan hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat DIY seperti bahasa dan sastra Jawa, seni kerajinan tradisional, makanan tradisional, prasarana budaya, desa budaya dan desa wisata, melalui sanggar, group kesenian, galeri, padepokan, forum, lembaga budaya, dan fasilitas budaya. Pada sisi lain, gelombang modernisme menyentuh masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan sehingga gejala lunturnya budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari menjadi semakin nyata dan sulit dihindari bahkan sampai pada modernisasi arsitektur bangunan-bangunan fisik milik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
- 2) Berbagai macam kesenian hidup dan berkembang di wilayah DIY, yakni di kalangan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun di luar kraton, tersebar di kabupaten dan kota, yang meliputi seni pertunjukan dan non pertunjukan. Seni pertunjukan, seperti seni tari, seni teater di seluruh wilayah DIY dikelola oleh sekitar 2.924 kelompok yang tersebar di 78 kecamatan.
- 3) Kesenian non pertunjukan, seperti seni rupa, seni kerajinan, tak terhitung banyaknya yang tersebar di wilayah DIY, baik yang dikelola perorangan maupun oleh kelompok, dalam bentuk sanggar-sanggar atau kelompok usaha/industri. Dari sekian banyak kelompok dan jenis kesenian tersebut kondisinya tidak merata. Ada yang dikelola dengan serius dan berkembang dengan baik, namun sebagian besar masih merupakan kelompok penggemar dan sekedar melestarikan, belum dikelola secara profesional.

- 4) Pengembangan budaya yang berbasis pada pelestarian yang berkelanjutan belum dapat memberikan nuansa dan warna dalam sistem pendidikan yang dikembangkan. Kecenderungan kearah mendidik generasi penerus dalam bingkai tata nilai dan budi pekerti luhur masih dalam tataran “wacana” yang tidak kunjung terimplementasi. Pengembangan budaya yang berbasis pada *local genius* untuk memperkuat ketahanan budaya belum menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat, demikian juga terhadap sebagian penyelenggara pemerintahan, hal ini akan menimbulkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan berbasis budaya, sebagai bingkai laku hidup masyarakat.
- 5) Memudarnya budaya di berbagai lapisan masyarakat menyebabkan ketahanan budaya masyarakat semakin rentan terhadap perubahan globalisasi, terjadinya ketegangan, ketidakserasian hubungan antar masyarakat dan terkikisnya nilai-nilai keluhuran di masyarakat. Nilai-nilai luhur dan kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya masih harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal.
- 6) Keberadaan Infrastruktur budaya yang meliputi panggung terbuka, pendopo, gedung pertunjukan, ruang pameran, studio musik, auditorium, laboratorium dan sanggar belum semuanya memenuhi standar minimal internasional. DIY mempunyai Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang bernilai pesona dan daya tarik warisan budaya dan dapat menunjukkan jati diri bangsa yang mempunyai tata nilai peradaban yang tinggi. Kawasan cagar budaya berada di wilayah perkotaan (urban), wilayah sub-urban, dan wilayah perdesaan (rural) yang meliputi 13 kawasan. Benda Cagar Budaya ada sebanyak 515 buah yang tersebar di kabupaten/kota dan museum yang terdiri dari museum benda cagar budaya dan kesenian, museum pendidikan dan ilmu pengetahuan, museum perjuangan, baik dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.

- 7) DIY mempunyai sekitar 30 museum yang tergabung dalam Barahmus, yang kondisinya berbeda-beda. Koleksi dari keseluruhan museum tercatat ada sekitar 68.217 koleksi. Hampir seluruh museum belum mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap secara teknis serta belum didukung dengan manajemen dan fasilitas yang memadai.
- 8) Koleksi naskah di museum baik yang berupa naskah tulisan tangan maupun naskah di lontar yang jumlahnya ribuan sebagian besar belum dialih aksarakan, sehingga apabila masih bersinggungan dengan pengguna naskah akan mempercepat kerusakan naskah yang tidak ternilai tersebut. Padahal museum dengan kekayaan naskahnya tersebut diharapkan akan menjadi Leiden-nya Yogyakarta.
- 9) Budaya lokal Yogyakarta tekanannya pada kesejahteraan non material, sehingga tidak mampu bersaing dengan kebudayaan mondial yang sangat menekankan kesejahteraan material.
- 10) Budaya lokal Yogyakarta pada khususnya memberikan tempat yang sangat tinggi pada tradisi yang menekankan hirarkhi sosial yang sangat kuat sehingga tidak mudah menjalankan perubahan-perubahan dan dianggap menjadi salah satu penghambat demokratisisme dan egalitarianisme.

e. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

- 1) Pemberdayaan perempuan, anak dan remaja telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan remaja, tetapi belum di semua bidang pembangunan.
- 2) Di samping itu, partisipasi remaja/pemuda dalam pembangunan juga makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang meluas di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pecandu narkotik dan obat-obat terlarang.

- 3) Upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan telah dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mampu berperan secara proporsional sejajar dengan kaum pria dalam pembangunan. Namun demikian, permasalahan kesetaraan *gender* di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masih belum tercapai secara optimal.
- 4) Sejalan dengan itu upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan peranserta penuh dari masyarakat juga telah dilakukan dalam rangka menjamin terlaksananya pemberian hak-hak mereka secara layak dan baik.

f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi

- 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara terus menerus dikembangkan. Hasil pengembangannya tercermin melalui berbagai publikasi ilmiah yang mengindikasikan banyaknya kegiatan penelitian yang didesiminasikan secara transparan kepada masyarakat.
- 2) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan iptek relatif masih rendah disebabkan antara lain belum efektifnya intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan antara pengembang dan pemakai iptek, belum berkembangnya budaya iptek dan masih terbatasnya sumberdaya iptek. Di sisi lain sebagian kecil rekayasa teknologi tepat guna ada juga yang sudah dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat.
- 3) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) sangat pesat di DIY dengan indikator angka melek TI (*IT literate rate*) yang cukup tinggi yaitu sebesar 20% dari jumlah penduduk. Pengembangan dan pemanfaatan TI ini antara lain berupa perangkat lunak (*software*), banyak dilakukan oleh pihak swasta dan perguruan tinggi ditandai dengan makin pesatnya pengelola jasa TI.

g. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Penurunan angka pertumbuhan penduduk yang signifikan di DIY belum berakibat banyak terhadap tingginya jumlah angkatan kerja, sehingga telah terjadi tekanan demografi terhadap aspek ketenagakerjaan. Hasil SP 1971-2000 jumlah angkatan kerja terus meningkat dari sekitar 1,02 juta naik menjadi 1,7 juta, dengan pertumbuhan per tahun sebesar 1,79%.
- 2) Sejalan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam kategori penganggur terbuka dan jumlah pencari kerja juga terus meningkat.

Hasil SP 1990 tercatat sekitar 37,7 ribu penduduk usia kerja yang masuk dalam kategori penganggur terbuka (sekitar 2,5% dari jumlah angkatan kerja). Tahun 2000 mengalami peningkatan yang relatif tinggi, yaitu menjadi sekitar 86,8 ribu orang (sekitar 5% dari jumlah angkatan kerja). Struktur pencari kerja didominasi oleh kaum perempuan dan atas dasar pendidikan sebagian besar merupakan pendidikan SLTA. Berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja sebagian besar di bidang pertanian.

- 3) Dalam upaya melakukan pemerataan penyebaran penduduk, pemerintah telah melakukan program transmigrasi, baik antar provinsi dan di dalam Provinsi DIY sendiri.

h. Agama

- 1) Komposisi pemeluk agama di DIY tahun 2004 terdiri dari 91,38% agama Islam, 5,38% agama Katholik, 2,88% agama Kristen, 0,17% agama Hindu dan 0,16% agama Budha.
- 2) Kerukunan antar umat beragama berkembang dengan baik, ditunjukkan oleh tidak berkembangnya konflik agama antar pemeluk agama; disamping itu karena adanya kesadaran para pemuka agama dalam membangun harmoni sosial dan hubungan intern antar umat beragama yang aman, damai dan saling menghargai.

- 3) Tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah berkembang dengan baik, namun pesan-pesan moral keagamaan belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Tingkat kesadaran kehidupan beragama masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, sehingga belum menggambarkan penghayatan dan penerapan terhadapnya. Ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun.

Prakiraan:

a. Sosial

- 1) Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang mempunyai faktor dominan yang menyebabkan fluktuasi peningkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat, oleh sebab itu pembangunan ekonomi memberikan peran yang sangat dominan.
- 2) Kebutuhan akan potensi lembaga, organisasi dan infrastruktur sangat diperlukan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
- 3) Ancaman Bencana Alam merupakan faktor yang sangat cepat menurunkan derajat kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- 4) Profesionalisme sumberdaya manusia, komitmen dan dukungan operasional sangat menentukan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- 5) Menguatnya globalisasi sistem nilai dan gaya hidup yang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip sosial dan kesejahteraan.
- 6) Struktur piramida penduduk yang semakin menua dan angka harapan hidup yang semakin panjang.

b. Kesehatan

- 1) Derajat kesehatan masyarakat DIY diperkirakan akan semakin meningkat yang ditandai oleh menurunnya angka kematian bayi dari 18 perseribu kelahiran menjadi 2,35 perseribu kelahiran, angka kematian ibu dari 102 perseratus ribu kelahiran menjadi 33,56 perseratus ribu kelahiran, angka kematian balita dari 22 perseribu kelahiran menjadi 2,44 perseribu kelahiran, angka gizi buruk dari 0,94% menjadi 0,39%, meningkatnya angka harapan hidup menjadi 75,98 tahun.
- 2) Peningkatan rasio dokter spesialis dari 28,33 perseratus ribu penduduk menjadi 48,33 perseratus ribu penduduk, rasio dokter gigi dari 6,64 perseratus ribu penduduk menjadi 26,64, rasio dokter umum dari 39,76 perseratus ribu penduduk menjadi 59,76 perseratus ribu penduduk.
- 3) Cakupan pelayanan sarana kesehatan (Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas) kemampuan pelayanan gawat darurat dari 61,59% menjadi 81% dan menurunnya wabah dan endemi, serta berkurangnya gizi kurang dan buruk pada balita.
- 4) Pelayanan kesehatan akan semakin baik yang ditandai oleh peningkatan jumlah dan mutu tenaga medis, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan masyarakat miskin. Selanjutnya perilaku hidup sehat juga akan meningkat melalui pencegahan sejak dini terhadap penyakit menular dan wabah.

c. Pendidikan

- 1) Historis DIY yang dikenal dengan identitas sebagai pusat pendidikan dan daerah tujuan pendidikan di tingkat nasional diperkirakan akan semakin berat untuk dipertahankan jika melihat trend data animo minat belajar ke DIY yang semakin menurun.
- 2) Berkembangnya pendidikan di daerah lain diperkirakan juga akan mempengaruhi minat belajar ke DIY. Jika kecenderungan turunnya daya saing dan daya tarik pendidikan Yogyakarta sebagai Kota Pelajar ini terus berlangsung, maka pada 20 tahun yang akan datang Yogyakarta dimungkinkan akan semakin kurang diminati para peserta didik.

- 3) Pengaruh global diperkirakan akan berdampak pada kehidupan masyarakat DIY selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. Dunia pendidikan secara tidak langsung akan terpengaruh oleh dampak liberalisasi ekonomi global. Kultur dan tata-krama yang kondusif bagi pendidikan di DIY akan terpengaruh oleh arus globalisasi yang sulit dibendung. Penyimpangan moralitas pelajar dan mahasiswa seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan penyimpangan seksualitas, kriminalitas dan perkelahian, dan lain-lainnya dapat menjadi ancaman serius.
- 4) Perluasan dan pemerataan pendidikan diperkirakan akan dicapai melalui wajib belajar sampai 12 tahun di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan persentase penduduk menurut ijazah dan STTB tertinggi yang dimiliki, DIY diperkirakan akan menduduki peringkat nasional yang lebih baik seiring dengan peningkatan perluasan dan pemerataan pendidikan di DIY.
- 5) Angka melek aksara, tingkat dan partisipasi pendidikan diperkirakan akan menjadi lebih baik, dan sangat dimungkinkan akan melebihi angka rata-rata nasional dengan asumsi APK, APM, APS dan SPM tidak mengalami penurunan.
- 6) Kualitas pendidikan diperkirakan akan terpacu oleh semakin berkembangnya satuan pendidikan yang berstandar internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pada saat berakhirnya RPJPD, diperkirakan semua sekolah di setiap kabupaten/kota akan memenuhi standar nasional, lebih dari 80 % lembaga pendidikan nonformal akan memenuhi standar nasional dan pendidikan informal akan berkembang selaras dengan semakin tingginya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Khusus pendidikan tinggi, diperkirakan semakin diminati oleh masyarakat DIY maupun luar DIY jika asumsi terjadinya peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi dan permintaan pasar tenaga kerja yang berkualitas terpenuhi. Budaya baca pada masyarakat akan semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya berbagai sumber informasi dan sumber belajar dan kemudahan untuk mendapatkannya.

- 7) Daya saing pendidikan DIY diperkirakan akan terus mendapat tantangan daerah lain dalam meraih prestasi di berbagai kejuaraan bidang pendidikan, baik tingkat nasional maupun internasional.
- 8) Kapasitas dan peranserta pemuda di berbagai bidang pembangunan akan semakin meningkat.
- 9) Budaya olahraga pada masyarakat dan prestasi olah raga akan semakin meningkat.

d. Kebudayaan

- 1) Nilai-nilai luhur, kehidupan seni, bahasa dan sastra, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat jika tidak dilestarikan diperkirakan lama kelamaan akan punah ditelan zaman akibat globalisasi. Hal tersebut mulai dapat dilihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan lunturnya *unggah-ungguh* (sopan santun), penguasaan bahasa lokal oleh generasi muda, rendahnya apresiasi seni tradisional seperti wayang kulit yang sepi penonton di desa-desa, matinya wayang orang dan mati surinya kethoprak dan lain-lain.
- 2) Keadaan sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang menjadi identitas khas DIY diperkirakan akan mengalami rusak berat dan cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik dan mekanis serta terjadi intrusi sosial.
- 3) Perubahan arsitektur bangunan-bangunan fisik berciri khas Yogyakarta diperkirakan semakin berkurang dengan digantikan oleh bangunan-bangunan bertipe modern. Selain itu, semakin berkurangnya warga masyarakat Yogyakarta yang membangun rumah tempat tinggal yang bernuansa budaya lokal diperkirakan akan terus berlanjut.
- 4) SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional cenderung mengalami stagnasi dalam kreativitas yang disebabkan kurang apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi.
- 5) Pelestarian budaya cenderung belum dapat memberikan nuansa dan warna dalam sistem pendidikan yang dikembangkan.

Kecenderungan kearah mendidik generasi penerus dalam bingkai tata nilai dan budi pekerti luhur untuk memperkuat ketahanan budaya diperkirakan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, demikian juga terhadap sebagian penyelenggara pemerintahan.

- 6) Seluruh museum yang ada di DIY secara teknis diperkirakan masih belum mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap serta belum didukung dengan manajemen dan fasilitas yang memadai.

e. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

- 1) Pembangunan di masa depan bagi remaja diperkirakan akan mengarah kepada menciptakan lingkungan, sarana-prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi mereka untuk belajar dan mengembangkan wawasan pengetahuan, serta aktivitas fisik dan sosial mereka, dengan meminimalkan pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi.
- 2) Pemberdayaan anak-anak, peningkatan partisipasi remaja/pemuda diperkirakan akan menghadapi tantangan yang berkaitan dengan bagaimana melepaskannya dari berbagai faktor yang merusak masa anak-anaknya baik yang bersifat kriminal dan kekerasan fisik oleh masyarakat maupun rumahtangga, yang bersifat ekonomi dalam hal mengeksploitasi usia anak-anak untuk kepentingan ekonomi serta dalam bidang sosio-kultural yang potensial merusak dan meracuni akhlak anak-anak termasuk perlindungan kesehatannya dari makanan, minuman, dan lingkungan yang tercemar zat-zat yang berbahaya.
- 3) Pemberdayaan wanita diperkirakan akan menghadapi tantangan untuk membangun strategi pemberdayaan yang meminimalkan konflik peran sehingga akan berkembang menjadi kultur kesetaraan yang harmonis di masyarakat dengan menempatkan wanita sebagai pusat kemandirian untuk mengatasi persoalannya, mensejahterakan dan mengatasi persoalan dirinya, meningkatkan kemampuannya berperan nyata dalam sosial ekonomi rumah tangga maupun lingkungan masyarakatnya.

- 4) Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan terjadinya *trafficking* (perdagangan) perempuan dan anak diperkirakan akan meningkat sehingga hak-hak mereka kurang terjamin secara layak dan baik.

f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi

- 1) Semakin baik mutu dan jangkauan layanan pendidikan akan berpengaruh besar terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga akan senantiasa mengalami perubahan. Khususnya di bidang produksi, informasi dan telekomunikasi perubahan yang begitu pesat berpengaruh pada kecepatan dan kemajuan pembangunan daerah.
- 2) Mutu penelitian semakin meningkat karena adanya partisipasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemanfaatan hasilnya akan tercermin pada produk daerah dengan ciri keunggulan komparatif dan kompetitif.
- 3) Pengembangan jasa teknologi informasi (TI) yang kian pesat, sejalan dengan pengembangan dunia tanpa batas.

g. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peningkatan pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama pada sektor-sektor unggulan. Peningkatan produktivitas meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya alam daerah dan meningkatkan PDRB secara optimal. Secara keseluruhan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan DIY. Prosentase pengangguran diperkirakan 8,52% dari angkatan kerja.

h. Agama

Laju peningkatan jumlah penduduk DIY di satu sisi relatif tidak akan merubah struktur penduduk menurut pemeluk agama. Di sisi lain penyediaan fasilitas peribadatan dan pendidikan setiap agama diperkirakan akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kerukunan antarumat beragama dan terciptanya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan aman.

Isu Strategis:

a. Sosial

- 1) Peningkatan jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar.
- 2) Pengembangan sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan.
- 3) Perlu adanya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat.
- 4) Peningkatan pemberdayaan, perbaikan mutu dan kemampuan, serta optimalisasi peran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 5) Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

b. Kesehatan

- 1) Pemerataan layanan kesehatan ke seluruh wilayah perdesaan melalui perbaikan ratio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis, serta dapat menjangkau dan dimanfaatkan oleh berbagai lapisan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk masyarakat ekonomi lemah.
- 2) Peningkatan mutu layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional.

- 3) Peningkatan dan pengembangan perilaku dan budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.
- 4) Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional berlangsung cepat dan dinamis, harus diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta kecukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi.
- 5) Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Yogyakarta.

c. Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat.
- 2) Penguatan keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY.
- 3) Pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global.
- 4) Penciptaan atmosfer yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan.
- 5) Akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan.
- 6) Pemantapan penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan.

- 7) Pengembangan satuan pendidikan berstandar nasional, internasional, dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- 8) Peningkatan mutu pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY.
- 9) Pengembangan fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca.
- 10) Penguatan dan pembinaan prestasi bagi pemuda dalam bidang pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 11) Peningkatan prestasi olah raga di setiap cabang olahraga sesuai dengan standar nasional dan internasional.

d. Kebudayaan

- 1) Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal.
- 2) Penanganan terhadap peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam kepunahannya.
- 3) Pengelolaan budaya di masa depan diarahkan untuk menjadi aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.
- 4) Perhatian khusus dan kaderisasi sejak dini di bidang kebudayaan agar tidak *stagnan*, karena generasi sekarang akan lebih mudah menyerap kebudayaan asing dari pada kebudayaannya sendiri. Secara khusus pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung.

- 5) Peningkatan sarana dan prasarana museum yang lengkap secara teknis serta dukungan manajemen yang memadai.
- e. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja
- 1) Perlindungan bagi anak dan remaja terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi.
 - 2) Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik.
 - 3) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
 - 4) Pengarusutamaan *gender* dalam perumusan peraturan perundangan-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran.
 - 5) Pencegahan terjadinya *trafficking* (perdagangan) perempuan dan anak, dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi
- 1) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.
 - 2) Peningkatan fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagi pengembangan riset/penelitian baik ilmu dasar maupun terapan sesuai dengan perkembangan teknologi global guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing daerah.
 - 3) Peningkatan akses dan *link* kerjasama pengembangan penelitian antara *stakeholders* agar berkelanjutan.
 - 4) Pemanfaatan Iptek dan TI di masyarakat perdesaan.
 - 5) Penanggulangan kejahatan teknologi informasi/*cyber crime*.

g. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan.
- 2) Sinkronisasi pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 4) Perbaikan perekonomian daerah untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
- 5) Penguatan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi.
- 6) Penyiapan transmigran secara lahir batin, advokasi/ pendampingan serta perlindungan.

h. Agama

- 1) Menjaga keharmonisan antar umat beragama dan kerukunan hidup beragama.
- 2) Mendorong perilaku masyarakat untuk lebih saling menghormati/toleran antar pemeluk agama.
- 3) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 5) Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama.

5. Pemerintahan dan Politik

Kondisi Saat Ini:

a. Pemerintahan dan Politik

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika berpolitik berlangsung cukup stabil. Hal ini disebabkan kondisi sebagian besar masyarakat masih memandang Kraton sebagai simbol penguasa wilayah tidak terlepas dari sejarahnya, yang senantiasa dapat menjembatani berbagai problematika yang timbul karenanya.

- 2) Peranserta birokrasi, organisasi sosial, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan berjalan sesuai fungsinya dan dapat berdialog sesuai proporsinya.
- 3) Dalam rangka merespon tuntutan pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah DIY telah melakukan pembenahan dan pengembangan dalam sejumlah tindakan dan kebijakan sejak tahun 2000, terutama pada aspek kapasitas pemerintahan (kapasitas SDM sebagai aparatur pemerintah) yang diharapkan dapat mendorong suatu perubahan yang signifikan. Pada waktu itu mulai dilakukan konsolidasi dan penancangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada *new public management*.

Paradigma ini mengisyaratkan upaya melakukan perubahan budaya dan cara berpikir pengelolaan pelayanan pemerintah yang lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat. Walaupun demikian dalam proses pembenahan dan pengembangan tersebut masih perlu perbaikan, sehingga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

- 4) Kondisi sosial politik di DIY bersifat dinamis namun tetap kondusif. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh hubungan sinergis pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah, kelompok-kelompok organisasi sosial politik dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga menjadikan mereka ikut terlibat secara aktif dalam mengelola konflik yang ada secara konstruktif.

Hal ini juga disebabkan adanya perubahan peran pemerintah, dari pembina orsospol dan ormas menjadi peran regulator, fasilitator dan pelayanan publik. Dalam hal ini kemandirian parpol dan ormas lebih dikedepankan, sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana. Lebih jauh, hal ini untuk mewujudkan ketahanan masyarakat berpangkal pada terbentuknya ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.

- 5) Menunjukkan perubahan yang cukup mendasar antara lain mengembalikan lagi asas kesatuan daerah, pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan, pengaturan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, pengaturan mengenai kedudukan DPRD, serta pengaturan mengenai Desa.
- 6) Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah telah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan selama ini berupaya untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tetap pada jalur keseimbangan, sehingga tarik ulur kepentingan antara pusat dan daerah yang terjadi dapat diselesaikan.
- 7) Karena pentingnya hubungan antar jenjang pemerintahan, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) perlu terus dilakukan jalinan kerjasama (*networking*), mengingat semakin kompleksnya permasalahan dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan publik, dengan demikian otonomi daerah dapat menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta dapat menciptakan daya saing yang positif antar daerah.

b. Hukum

- 1) Ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan daerah, dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Produk hukum seperti Peraturan Daerah yang merupakan implementasi dari otonomi daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
- 3) Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Pemberantasan tindakan kejahatan dan tindak kriminalitas telah dilakukan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba/NAPZA. Namun demikian upaya-upaya tersebut masih belum berhasil secara optimal karena semakin tingginya tingkat dan variasi tindak kejahatan dan kriminalitas yang semua itu membutuhkan kualitas aparat dan sumberdaya pendukung lainnya untuk menanganinya.

c. Kerjasama

- 1) Pada era pasar bebas dan globalisasi, Pemerintah Provinsi DIY dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, telah melakukan kerjasama dan fasilitasi dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah, lembaga perguruan tinggi maupun swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama yang telah dilakukan sebanyak 61 dengan pihak dalam negeri dan 9 dengan pihak luar negeri.

Kerjasama ini merupakan alternatif pemecahan dari masalah-masalah yang timbul antara lain: keterbatasan sumberdaya dan investasi, efisiensi dalam pengelolaan sumberdaya, konsep perencanaan daerah (*regional planning*), keterbatasan jangkauan pelayanan dan masalah lintas batas (sumberdaya alam yang terletak di lintas batas, hambatan akses dan pemanfaatan potensi).

- 2) Bidang-bidang kerjasama dengan pihak dalam negeri yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah bidang peternakan, pertanian, dan transmigrasi, sedangkan kerjasama dengan pihak luar negeri masih perlu dioptimalisasikan pelaksanaannya. Bidang-bidang yang potensial dikerjasamakan adalah seni budaya, pendidikan dan iptek, pariwisata, informasi dan komunikasi, ekonomi perdagangan, industri dan investasi, pertanian dan perikanan, kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial, administrasi pemerintahan dan pengembangan SDM.

Prakiraan:

- a. Pemerintahan dan Politik

Penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika berpolitik di DIY secara empirik mampu memberi kontribusi secara positif dalam membentuk konstruksi sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa/kelurahan pada umumnya dalam sistem NKRI. Secara khusus Pemerintahan Provinsi DIY akan melakukan dinamisasi, inovasi, aspiratif dan mewujudkan kondisi sosial, politik, dan budaya yang kondusif.

- b. Hukum

Penegakan hukum dan pelayanan hukum bagi masyarakat DIY akan semakin bermutu, adil, mudah dan tanpa diskriminasi; dengan didukung organisasi yang solid, aparat penegak hukum yang profesional, prasarana yang lengkap dan memadai. Dampak nyata, tindak pelanggaran hukum dapat dicegah, kriminalitas dapat dikurangi, dan kasus hukum dapat diselesaikan secara tuntas dan adil sehingga dapat menciptakan kehidupan yang tertib hukum, aman, stabil dan tenteram bagi masyarakat DIY.

c. Kerjasama

Sejalan dengan perkembangan jaman terlebih dengan semakin dibukanya secara luas akses ke seluruh penjuru dunia (*no boundaries countries*) kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY meliputi semua bidang urusan. Masyarakat DIY akan menjadi bagian dari masyarakat internasional dalam kancah *global village*.

Isu Strategis:

a. Pemerintahan dan Politik

- 1) Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan.
- 2) Pengembangan sistem informasi manajemen dan penataan sistem manajemen kinerja organisasi aparat pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional.
- 3) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*).
- 4) Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik menuju *Good Governance* termasuk di dalamnya dalam rangka pemberantasan KKN.
- 5) Peningkatan kontribusi hubungan pemerintah-masyarakat secara positif.
- 6) Mendorong sebuah proses transparansi, partisipatif dan akuntabel dari penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas politik.
- 7) Mendorong spirit pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dari reaktif menuju pro aktif.

b. Hukum

- 1) Pemerataan akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat.

- 2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah.
- 3) Peningkatan pemahaman kesadaran dan budaya hukum.
- 4) Peningkatan pemberantasan korupsi.
- 5) Peningkatan prinsip-prinsip hukum dan penegakan supremasi hukum.

c. Kerjasama

- 1) Peningkatan kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat.
- 2) Peningkatan kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

6. Prasarana Wilayah

Kondisi Saat Ini:

a. Transportasi

- 1) Sistem transportasi mengindikasikan transportasi yang memanfaatkan moda darat, dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 13% per tahun dan kendaraan pribadi 28% per tahun yang didominasi oleh sepeda motor. Angkutan umum sebesar 20% dan kendaraan barang sebesar 15%.
- 2) Angkutan barang belum mempunyai terminal barang (bongkar-muat) yang representatif, termasuk dalam hal pembatasan area dan waktu operasi angkutan barang.
- 3) Akibat volume lalu-lintas melebihi kapasitas jalan, penyalahgunaan ruas jalan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan lalu-lintas, terutama di jaringan jalan pusat kota.
- 4) Dalam pelayanan angkutan umum telah dilakukan perubahan manajemen angkutan umum dengan konsep *buy the service* sebagai upaya untuk memperbaiki pelayanan angkutan umum khususnya angkutan perkotaan dan mengatasi permasalahan transportasi.

- 5) Dalam bidang transportasi kereta api telah dilakukan pembangunan dan pengoperasian jalur ganda (*double track*) yang menghubungkan Stasiun Solo Balapan-Stasiun Tugu Yogyakarta-Stasiun Kutoarjo. Dalam rangka angkutan barang dengan kereta api telah dimanfaatkan beberapa stasiun sebagai lokasi terminal barang (*dry port*).
- 6) Dari sisi transportasi udara, dalam rangka peningkatan status dari bandara domestik menjadi Internasional telah disusun rencana pengembangan Bandara Adisucipto dengan meningkatkan fasilitas yang ada. Pengembangan ini perlu dilakukan mengingat tingkat kegiatan operasional penerbangan sudah sangat tinggi (mencapai 40 penerbangan per hari) di samping juga tingginya animo maskapai penerbangan untuk membuka jalur penerbangan dari/ke Yogyakarta.
- 7) Dalam bidang transportasi laut, DIY memiliki pelabuhan ikan (skala besar dan skala kecil milik rakyat). Pelabuhan ikan yang besar adalah Sadeng dan Glagah, Kulon Progo yang saat ini sedang dikembangkan. Mengingat kondisinya, pelabuhan-pelabuhan tersebut masih perlu difasilitasi dengan jalur transportasi yang memadai.

b. Sumberdaya Air

- 1) Sumberdaya air utama di DIY adalah Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo yang berasal dari daerah aliran sungai (DAS) Progo, DAS Opak dan DAS Serang. Potensi sumberdaya air WS Progo-Opak-Oyo berasal dari air hujan, air permukaan, air tanah, mata air, sungai bawah tanah, waduk dan embung.
- 2) Sumberdaya air dimanfaatkan untuk irigasi, kebutuhan rumah tangga, industri, tenaga listrik dan penggelontoran kota. Kebutuhan air untuk rumah tangga dipenuhi melalui sistem air pipa PDAM, sumur dan hidran umum. Pemanfaatan air untuk industri berasal dari air tanah sumur dalam dan sebagian kecil memakai air dan sistem suplai perpipaan. Pemanfaatan air untuk tenaga listrik mikro hidro dilakukan di Saluran *Van Der Wicjk* dan Saluran Mataram dengan memanfaatkan air irigasi yang sudah ada. Pemanfaatan air untuk penggelontoran dilakukan dalam sistem penggelontoran sanitasi perkotaan dengan menggunakan air permukaan.

- 3) Saat ini terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air yang mengalir di badan sungai. Penurunan kuantitas terjadi sebagai akibat terganggunya fungsi hidrologi sebagai dampak penggunaan tanah/alih fungsi lahan dan pengelolaan tanah yang tidak dikendalikan di daerah tangkapan air. Penurunan kualitas air akibat peningkatan limbah cair dari kegiatan penduduk dan berkembangnya industri.
- 4) Selain itu juga terjadi pemakaian air yang tidak efisien, terutama untuk keperluan irigasi dan kolam ikan.

c. Keciptakaryaan

- 1) Pembangunan perumahan dan permukiman cenderung mengarah ke wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY). Perkembangan perumahan dan permukiman mengakibatkan meningkatnya tingkat konversi lahan dari pertanian menjadi perumahan dan bangunan.
- 2) Kebutuhan air minum mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan penduduk dan kegiatan masyarakat. Kebutuhan air untuk perkotaan yang dilayani oleh PDAM baru mencapai 28,35%, sedangkan tingkat pelayanan perkotaan dan perdesaan mencapai 55,76 %.
- 3) Saat ini masih banyak limbah cair industri yang dibuang langsung ke sistem air limbah terpusat atau ke lingkungan sekitar tanpa ada pengolahan.
- 4) Cakupan pelayanan air limbah terpusat baru mencapai sekitar 4%. Sistem tersebut terletak di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang terdiri dari jaringan lateral dan sistem penggelontor, jaringan induk dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Total cakupan pelayanan limbah dan sanitasi berkisar 51,8%.
- 5) Pengelolaan sampah belum seperti yang diharapkan karena pelayanan pengangkutan sampah masih rendah. Pelayanan pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru mencapai sekitar 35% dari total produksi sampah.
- 6) Cakupan sistem drainase mencapai sekitar 53,42%. Sistem ini mengandalkan keberadaan sungai-sungai yang melintas sebagai drainase induk yang cenderung meningkatkan terjadinya pencemaran air sungai dari hulu menuju hilir.

- 7) Permasalahan pembangunan sampah dan drainase, antara lain: meningkatnya pencemaran lingkungan dan jumlah sampah; makin terbatasnya lahan tempat pembuangan akhir; tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematas air hujan.

Prakiraan:

a. Transportasi

- 1) Di masa depan sistem transportasi akan dikelola secara terpadu antara angkutan jalan, angkutan kereta api dan udara dalam suatu pelayanan yang efisien dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, keserasian penanganan berbagai moda transportasi.
- 2) Transportasi darat dikelola dengan melaksanakan optimalisasi pelayanan lalu-lintas pada seluruh jaringan jalan yang ada, penerapan sistem lalu lintas yang ramah lingkungan, hemat energi dan berbudaya, terciptanya sistem sirkulasi barang dalam suatu jaringan lintas dan tersedianya fasilitas bongkar muat yang terpadu dengan moda transport lain, terlaksananya pengembangan angkutan umum di wilayah DIY meliputi angkutan perkotaan, wilayah (regional) dan perdesaan dalam satu kesatuan pelayanan.
- 3) Transportasi udara menunjukkan terlaksananya pengembangan fasilitas penerbangan sebagai bandara berstandar internasional dengan memperkuat simpul bandara dan mengkombinasikan sebagai terminal terpadu, pengembangan fasilitas kargo dengan akses dari arah selatan dan fasilitas pemrosesan barang serta terlaksananya penerbangan langsung dengan lebih banyak kota yang memiliki potensi wisatawan.
- 4) Transportasi laut memperlihatkan sinergitas pelabuhan-pelabuhan yang ada dan mengarah terciptanya pelabuhan umum bertaraf internasional dengan mengharmonisasikan pengembangan wilayah pantai selatan baik terkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun wisata pantai selatan.

b. Sumberdaya Air

- 1) Dalam jangka panjang pengelolaan sumberdaya air yang meliputi aspek konservasi, pendayagunaan dan pengendalian dilaksanakan dengan baik, kuantitas dan kualitas air terjaga, serta pemanfaatan air yang semakin efisien dengan prinsip *one river, one plan, one integrated management*.
- 2) Penurunan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh daya rusak air dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan kekeringan.

c. Keciptakarya

Dalam jangka panjang penyediaan pelayanan keciptakarya yang meliputi penyediaan permukiman dan perumahan, air minum, pengelolaan air limbah dan sanitasi, pengelolaan persampahan dan drainase memperlihatkan kondisi yang memadai.

Isu Strategis:

a. Transportasi

- 1) Penataan sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda (darat, laut dan udara) dan antar wilayah.
- 2) Optimalisasi pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk (moda transportasi *mass rapid transportation*) dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan.
- 3) Optimalisasi pelayanan transportasi darat yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat pemasaran dan pendidikan.
- 4) Pengembangan bandar udara bertaraf internasional.
- 5) Pengendalian polusi udara akibat transport meningkat karena kurangnya pengendalian di jalan.

b. Sumberdaya Air

- 1) Penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya air akibat pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air yang tidak efisien.
- 2) Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengairan, serta prasarana dan sarana pendukung lainnya.
- 3) Optimalisasi jaringan irigasi dan pengairan sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana.
- 4) Penataan sistem irigasi dan pengairan yang dapat mendukung pembangunan pertanian.
- 5) Keterkaitan dan keterpaduan antara irigasi dan pengairan, sungai dan tambak dalam mendukung pembangunan daerah.
- 6) Optimalisasi kelembagaan yang mengatur pengelolaan irigasi dan pengairan.
- 7) Pengaturan mekanisme untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya air.
- 8) Penyediaan air baku melalui penyaluran air dari sumber air menuju instalasi pengolahan.
- 9) Peningkatan pelayanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan di wilayah perkotaan dan perdesaan.
- 10) Bahaya banjir akibat meluapnya sungai dan bahaya kekeringan serta kelangkaan air.
- 11) Pengelolaan sumberdaya air perlu diarahkan dalam upaya menjaga ketersediaan dan peningkatan kualitas air.
- 12) Upaya-upaya mempertahankan fungsi hidrologis sangat penting dilakukan untuk mempertahankan ketersediaan air.
- 13) Pengendalian alih fungsi lahan untuk menekan alih fungsi lahan.
- 14) Sumber-sumber air potensial perlu dimanfaatkan dalam upaya peningkatan penyediaan air bersih.
- 15) Pengembangan jaringan irigasi diarahkan untuk peningkatan produktivitas lahan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.

- 16) Pengupayaan penyeimbangan ketersediaan air di musim penghujan dan kemarau menjadi sangat penting dilakukan untuk menjaga kontinuitas penyediaan air.
- 17) Dari sisi kualitas air, upaya pengendalian pencemaran air oleh limbah perlu lebih ditingkatkan melalui pengembangan program pengelolaan air limbah terpadu.
- 18) Partisipasi masyarakat penting ditumbuhkembangkan melalui pembudayaan pengelolaan air limbah pada tingkatan individu, keluarga, maupun komunal.
- 19) Usaha pemanfaatan air melalui pengembangan sumber energi mikro, budidaya perikanan, maupun untuk tujuan wisata.

c. Keciptakaryaan

- 1) Pengembangan prasarana dasar perumahan dan permukiman yang terpadu dengan memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan.
- 2) Penataan perumahan dan permukiman di perdesaan dan perbatasan yang menyatu dengan pengembangan pusat kegiatan ekonomi.
- 3) Pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- 4) Peningkatan penanganan air minum, air limbah, dan persampahan.
- 5) Peningkatan pelayanan penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah secara terpusat di perkotaan.
- 6) Mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- 7) Penataan dan pemeliharaan sistem drainase dengan mendorong dibuatnya sumur-sumur resapan sebagai imbuhan terhadap air tanah.
- 8) Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
- 9) Pembangunan perumahan mengarah pembangunan secara vertikal di perkotaan.

7. Struktur dan Pola Ruang

Kondisi Saat Ini:

- a. Struktur dan pola ruang wilayah DIY sangat dipengaruhi adanya interaksi antara simpul-simpul perkembangan wilayah di luarnya dan kondisi internal wilayah.
- b. Wilayah-wilayah di luar DIY yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pemanfaatan ruang dan perkembangan pembangunan, antara lain:
 - 1) DIY dengan kota-kota besar di P. Jawa-Bali, yaitu kaitan antara PKN Semarang-Solo/Surakarta-Cilacap terhadap DIY;
 - 2) DIY dengan ibukota provinsi sekitarnya (Jawa Tengah), yaitu PKW Magelang-Klaten-Purworejo-Salatiga-Wonogiri-Sukoharjo terhadap wilayah DIY;
 - 3) Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten di wilayah DIY berinteraksi dengan kota besar/kecil di sekitar DIY seperti Magelang, Klaten, Purworejo, Surakarta, Wonogiri;
 - 4) Kebijakan pengembangan terpadu wilayah Joglosemar, Pawonsari Bakulrejo, Gelangmanten, dengan memadukan simpul-simpul utama di Jawa Tengah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing.
- c. Implikasi dari keterkaitan antar wilayah eksternal tersebut dalam penataan ruang wilayah adalah:
 - 1) Semakin meningkatnya kegiatan yang bersifat perkotaan, karena simpul-simpul kegiatan tersebut tergabung dalam satu pola jaringan tertentu. Dalam hal ini aksesibilitas, kompatibilitas (kesesuaian interaksi kegiatan) dan fleksibilitas merupakan syarat yang mendasar bagi DIY dan wilayah di sekitarnya;
 - 2) Mampu meningkatkan daya saing dari masing-masing simpul dalam memperebutkan investasi baik dalam tingkat regional maupun internasional;
 - 3) Struktur tata ruang wilayah DIY secara internal dipengaruhi oleh kondisi topografi dan geografis wilayah, yang meliputi kawasan tertentu nasional (lindung dan cagar budaya), kawasan cepat tumbuh, kawasan potensial untuk berkembang, kawasan yang kritis lingkungan Provinsi DIY.

- d. Kawasan-kawasan Provinsi DIY yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pemanfaatan ruang dan perkembangan pembangunan di Provinsi DIY, antara lain:
- 1) Kawasan Fungsional yang meliputi Hutan Lindung (Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo), Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Cagar Alam/Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya);
 - 2) Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS Progo, DAS Opak-Oyo dan DAS Serang);
 - 3) Kawasan tertentu nasional (Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Cagar Budaya: Keraton, candi-candi, Kawasan Rawan Bencana: jalur patahan Opak, wilayah Gunung Merapi, dan rawan tsunami, banjir dan air pasang di pesisir pantai Kulon Progo dan Bantul);
 - 4) Kawasan yang cepat tumbuh (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, dan Bantul yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta);
 - 5) Kawasan yang potensial untuk berkembang (Kabupaten Bantul: Sewon, Kasihan, Banguntapan, Sedayu, Srandakan, Imogiri dan Piyungan; Kabupaten Sleman: Godean, Gamping, Pakem, Depok; Kabupaten Kulon Progo: Wates, Temon, Pengasih, Sentolo, dan Nanggulan; Kabupaten Gunungkidul: Wonosari, Bunder, Rongkop, Sadeng);
 - 6) Kawasan yang kritis lingkungan (Kabupaten Gunungkidul: di Purwosari, Panggang, Tepus, dan Rongkop; Kabupaten Bantul: di Worotelo, Wukirsari, Muntuk, Jatimulyo, Sendangsari, dan Dlingo; Kabupaten Kulon Progo: Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo, dan Kokap).
- e. Karakteristik tata ruang internal DIY ditandai tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya namun di lain pihak menghadapi keterbatasan daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Wilayah DIY seluas 318.580 Ha, dengan 47,188% (150.332 Ha) merupakan kawasan lindung (belum termasuk kawasan rawan gempa).

Prakiraan:

- a. Dalam jangka panjang terwujud struktur dan pola ruang yang memperlihatkan manajemen ruang yang lebih tertata, baik yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang maupun kelembagaannya.
- b. Pertumbuhan wilayah atau kawasan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di berbagai sektor kehidupan semakin merata sehingga mampu mengurangi kesenjangan wilayah.
- c. Bertambahnya kawasan tumbuh cepat yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah dan berkurangnya lahan yang kritis lingkungan dengan mewujudkan fungsi konservasi secara optimal.

Isu Strategis:

- a. Konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- c. Percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial dan memiliki peluang pertumbuhan ekonomi tinggi.
- d. Tekanan kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya pada kawasan lindung (perubahan fungsi lahan) yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan bencana.
- e. Pola pemanfaatan ruang yang tidak teratur khususnya pada wilayah perkotaan.
- f. Pengendalian perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan, sehingga perlu perencanaan yang matang dan dikembangkan sesuai dengan daya dukung.
- g. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan.

BAB III

MAKRO EKONOMI

1. Pembangunan ekonomi pada masa mendatang dituntut untuk dapat tumbuh tinggi dengan struktur perekonomian yang kokoh yang ditandai dengan makin menguatnya peranan sektor sekunder dan tersier serta didukung oleh sektor primer yang handal, sehingga mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
2. Secara umum pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain berupa tabungan domestik, tenaga kerja, teknologi, stabilitas keamanan, sosial, politik, hukum dan ekonomi (moneter), sedangkan faktor eksternal antara lain berupa investasi dari luar daerah dan ekspor ke luar daerah. Fluktuasi ekonomi yang terjadi pada akhir-akhir ini menunjukkan pola yang tidak beraturan, mengakibatkan prediksi ekonomi pada masa mendatang sulit diperkirakan secara pasti.
3. Dalam kurun waktu setelah krisis, perekonomian DIY bergerak ke arah pemulihan, pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai 2,68% dan inflasi rata-rata tercatat 8,63%, meski pencapaian ini belum setinggi periode sebelum krisis ekonomi yang mampu tumbuh rata-rata 6,81%. Karakteristik DIY yang minim sumberdaya alam dan skala pengembangan sektor industri yang tidak sebesar provinsi lain di Jawa menjadikan pertumbuhan ekonomi relatif lebih kecil.
4. Peranan sektoral menunjukkan sektor pertanian bertendensi menurun, hal ini disebabkan, antara lain berkurangnya luas tanah pertanian karena alih fungsi, kecepatan nilai tambah pertanian kalah bersaing dibandingkan dengan kenaikan nilai tambah sektor industri dan sektor perdagangan. Hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan struktur basis perekonomian dari primer menuju tersier. Kondisi ini sangat wajar terjadi, namun pemerintah daerah perlu tetap memiliki komitmen untuk pengembangan kegiatan pertanian yaitu dengan mengatur penggunaan lahan.

5. Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB menunjukkan sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor utama penyumbang PDRB. Meskipun kontribusi sektor industri masih lebih kecil dari sektor jasa-jasa, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, namun sektor industri tetap merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang potensial karena sifat industri yang mampu mendorong pembentukan nilai tambah.

BAB IV

FILOSOFI, VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

A. DASAR FILOSOFI

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi DIY adalah ***Hamemayu Hayuning Bawana***, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.

Hakekat budaya adalah hasil ***cipta, karsa dan rasa***, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan bermanfaat. Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ***gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi tentrem, kerta raharja***, dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Hamemayu Hayuning Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

B. VISI

Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi dan aspek-aspek yang potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan perkembangan global yang pesat perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung.

Sehubungan dengan hal tersebut maka visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah:

“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Sebagai **pusat pendidikan terkemuka**, di masa depan DIY menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama, yang didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Sebagai **pusat budaya terkemuka**, di masa depan DIY merupakan tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya.

Sebagai **daerah tujuan wisata terkemuka**, di masa depan DIY merupakan daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. **Masyarakat yang maju** adalah juga masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli dan tenaga professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi. **Masyarakat yang maju** juga merupakan masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Di samping itu, **masyarakat yang maju** adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain hal-hal tersebut, **masyarakat yang maju** adalah masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat dipengaruhi pula oleh kemajuan masyarakat. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Masyarakat sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

C. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

D. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Memperhatikan kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi, dan isu strategis serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan maka pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Terwujudnya DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Terwujudnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah;
 - b. Tersedianya sumberdaya pendidikan yang handal;
 - c. Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan;
 - d. Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY;
 - e. Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
 - f. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya;
 - g. Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi.

2. Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan;
 - c. DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur;
 - d. Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif;
 - e. Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya;
 - f. Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata;
 - g. Masuknya DIY dalam *culture itinerary/culture map* tingkat Asia Tenggara.

3. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata;
 - b. Tersedianya fasilitas pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal;
 - c. Meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dan atau oleh pelaku wisata;
 - d. Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
 - e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi OTDW.

4. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Terselenggarakannya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum;
 - b. Terciptanya kelembagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang mantap;
 - c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah;
 - d. Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai;
 - e. Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif di Asia Tenggara;
 - f. Terpenuhinya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama;
 - g. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak, dan remaja;
 - h. Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi;
 - i. Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi.

E. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Arah pembangunan merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan. Arah pembangunan yang di tempuh adalah:

1. Dalam mewujudkan misi pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, maka arah pembangunan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Mendorong Perguruan Tinggi untuk menciptakan pusat-pusat keunggulan ilmiah (*center of excellence*);
 - b. Pengembangan promosi dan jejaring pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - c. Pelayanan pendidikan yang bermutu diselenggarakan secara terjangkau dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
 - d. Pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan lewat peningkatan penguasaan teknologi;
 - e. Pelayanan pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur;
 - f. Pengembangan fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca;
 - g. Peningkatan mutu sistem pendidikan, kesejahteraan pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - h. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.
 - i. Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga;
 - j. Pengembangan lingkungan sosial/masyarakat yang kondusif untuk pendidikan dengan menekankan pada prinsip pendidikan sepanjang hayat;
 - k. Pengembangan usaha jasa pendukung aktivitas pendidikan menjadi usaha yang profesional;
 - l. Pengembangan gerakan peduli pendidikan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

2. Dalam mewujudkan misi budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, maka arah pembangunan yang ditempuh adalah:
 - a. Peningkatan peradaban dan kualitas hidup masyarakat;
 - b. Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan ketahanan budaya serta mendorong terjadinya transformasi dan inovasi budaya di masyarakat berbasis kreativitas dan modernitas;
 - c. Membina, melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam setiap langkah tindakan secara bersama dengan melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah;
 - d. Peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya, kecerdasan budi pekerti, dan jati diri yang kuat pada masyarakat;
 - e. Mengembalikan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya;
 - f. Mewujudkan pusat kajian budaya Jawa dan pengembangan kepustakaan Jawa.

3. Dalam mewujudkan misi kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, maka arah pembangunan yang ditempuh adalah:
 - a. Fasilitasi dan pembangunan kawasan wisata dengan basis budaya dan pelestarian lingkungan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat;
 - b. Peningkatan kualitas SDM pelaku pariwisata yang memiliki keunggulan daya saing;
 - c. Pengembangan wisata edukasi secara komprehensif dan terpadu antar sektor;
 - d. Optimalisasi aset wisata melalui peningkatan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - e. Pengembangan jejaring baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - f. Inovasi pengembangan obyek wisata maupun paket wisata yang mampu bersaing di pasar global termasuk di dalamnya wisata *Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition* (MICE);

- g. Pengembangan yang terpadu dalam bidang *Trade, Tourism, and Investment* (TTI);
 - h. Pengembangan agrowisata secara profesional;
 - i. Menumbuhkan dan mengembangkan wisata minat khusus kegunungpian, maritim dan potensi alam maupun budaya khas lainnya untuk menjaring wisatawan dalam dan luar negeri;
 - j. Peningkatan daya saing pariwisata daerah yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan wisatawan tiap tahun (*growth oriented*).
4. Dalam mewujudkan misi sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat, maka arah pembangunan yang ditempuh adalah:
- a. Peningkatan *good governance* dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Mewujudkan *cyber province*;
 - c. Peningkatan kapasitas hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - d. Fasilitasi upaya perolehan kepastian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - e. Pembangunan dan pelayanan sistem transportasi dan prasarana wilayah yang dititikberatkan untuk:
 - 1). Melayani perkembangan wilayah;
 - 2). Peningkatan aktivitas perekonomian di daerah maupun antar daerah;
 - 3). Peningkatan aksesibilitas sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata;
 - 4). Mengurangi kesenjangan/disparitas pertumbuhan regional;
 - 5). Memperkuat keterkaitan antar wilayah dalam provinsi dan yang berbatasan;
 - 6). Pengembangan citra wilayah sebagai provinsi yang bertaraf internasional;

- 7). Memanfaatkan layanan kereta api sebagai pendukung transportasi wilayah disinergikan dengan moda transportasi lain yakni jalan dan udara.
- f. Penciptaan transportasi yang efisien dan efektif secara terpadu untuk mendukung perekonomian, pendidikan, dan pariwisata;
 - g. Percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;
 - h. Peningkatan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral untuk kesejahteraan rakyat;
 - i. Peningkatan fungsi konservasi dan perlindungan sumberdaya alam melalui optimalisasi fungsi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya alam, reboisasi dan penanggulangan resiko bencana;
 - j. Pengembangan pusat perbenihan (*seed center*) bagi komoditi pertanian secara luas;
 - k. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian dalam arti luas yang didukung oleh pemanfaatan lahan dan teknologi secara optimal;
 - l. Pengembangan sistem industri, dalam lingkup usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan (*non pollutant*) dan berbasis keluarga dan teknologi;
 - m. Perlindungan terhadap lahan-lahan sentra penghasil utama pertanian dari ancaman pengalihan fungsi lahan dalam regulasi daerah;
 - n. Pengembangan budidaya hasil pertanian secara selektif yang berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor;
 - o. Modernisasi sarana perikanan darat dan laut serta sarana pengolahan hasil laut;
 - p. Mendorong dan memfasilitasi tumbuhkembangnya industri kreatif secara kompetitif;
 - q. Fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan industri kreatif secara memadai;
 - r. Mendorong peningkatan kualitas SDM bidang industri kreatif dengan melibatkan lembaga pendidikan dan profesional;

- s. Fasilitasi terbentuknya jejaring kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- t. Peningkatan keharmonisan antar umat beragama dalam menjalankan kerukunan hidup beragama yang saling menghormati dan bertoleransi;
- u. Peningkatan pemahaman ajaran agama dalam pengamalannya sehingga penyimpangan terhadap ajaran agama dapat dicegah;
- v. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan remaja dari tindak kekerasan, praktek kejahatan ilegal serta pengaruh buruk sebagai dampak dari globalisasi;
- w. Peningkatan penghormatan terhadap perempuan dan memberikan peran dalam pembangunan serta memenuhi hak dasar dalam segala bidang (kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik);
- x. Peningkatan kerjasama mendorong perekonomian rakyat;
- y. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- z. Peningkatan ketahanan dan pelayanan sosial;
- aa. Pengembangan sistem perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat;
- bb. Pengurangan angka pengangguran;
- cc. Peningkatan produktivitas pekerja;
- dd. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
- ee. Penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya;
- ff. Peningkatan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja;
- gg. Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi, pengendalian distribusi penduduk dan peningkatan kualitas SDM;
- hh. Pembangunan kesehatan;
- ii. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat.

F. MATRIK FILOSOFI - VISI - MISI - SASARAN - ARAH RPJPD TAHUN 2005-2025

VISI	MISI	SASARAN	A R A H
1	2	3	4
<u>FILOSOFI: HAMEMAYU HAYUNING BAWANA</u>			
<p>1. Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara</p>	<p>1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal</p>	<p>a Terwujudnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional dan internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah.</p> <p>b Tersedianya sumberdaya pendidikan yang handal</p> <p>c Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan</p>	<p>1) Mendorong Perguruan Tinggi untuk menciptakan pusat-pusat keunggulan ilmiah (<i>center of excellence</i>).</p> <p>2) Pengembangan promosi dan jejaring pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>3) Pelayanan pendidikan yang bermutu diselenggarakan secara terjangkau dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.</p> <p>4) Pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan lewat peningkatan penguasaan teknologi.</p> <p>5) Pelayanan pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur.</p> <p>6) Pengembangan fasilitas/ sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca.</p> <p>7) Peningkatan mutu sistem pendidikan, kesejahteraan pendidik, dan tenaga kependidikan.</p>

VISI	MISI	SASARAN	A R A H
1	2	3	4
		<p>d Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY</p> <p>e Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.</p> <p>f Meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya</p> <p>g Meningkatkan proporsi masyarakat yang berpendidikan menengah dan tinggi.</p>	<p>8) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>9) Peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga.</p> <p>10) Pengembangan lingkungan sosial/ masyarakat yang kondusif untuk pendidikan dengan menekankan pada prinsip pendidikan sepanjang hayat.</p> <p>11) Pengembangan usaha jasa pendukung aktivitas pendidikan menjadi usaha yang profesional.</p> <p>12) Pengembangan gerakan peduli pendidikan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.</p>
<p>2. Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara</p>	<p>2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan</p>	<p>a Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>b Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai budaya daerah secara berkesinambungan</p>	<p>1) Peningkatan peradaban dan kualitas hidup masyarakat.</p> <p>2) Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan ketahanan budaya serta mendorong terjadinya transformasi dan inovasi budaya di masyarakat berbasis kreativitas dan modernitas.</p>

VISI	MISI	SASARAN	ARAH
1	2	3	4
		<p>c DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur.</p> <hr/> <p>d Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya modern yang positif.</p> <p>e Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya.</p> <p>f Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata.</p> <p>g Masuknya DIY dalam <i>culture itinerary / culture map</i> tingkat Asia Tenggara</p>	<p>3) Membina, melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam setiap langkah tindakan secara bersama dengan melibatkan masyarakat, swasta dan pemerintah.</p> <p>4) Peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya, kecerdasan budi pekerti, dan jati diri yang kuat pada masyarakat.</p> <p>5) Mengembalikan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya</p> <p>6) Mewujudkan pusat kajian budaya Jawa dan pengembangan kepastakaan Jawa</p>
<p>3. Daerah tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara</p>	<p>3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif</p>	<p>a Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata.</p> <p>b Tersedianya fasilitas pendukung Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang handal.</p>	<p>1) Fasilitasi dan pembangunan kawasan wisata dengan basis budaya dan pelestarian lingkungan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku pariwisata yang memiliki keunggulan daya saing.</p>

VISI	MISI	SASARAN	A R A H
1	2	3	4
		<p>c Meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dan atau oleh pelaku wisata.</p> <p>d Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.</p> <p>e Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi ODTW</p>	<p>3) Pengembangan wisata edukasi secara komprehensif dan terpadu antar sektor.</p> <p>4) Optimalisasi aset wisata melalui peningkatan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>5) Pengembangan jejaring baik di dalam negeri maupun di luar negeri</p> <p>6) Inovasi pengembangan obyek wisata maupun paket wisata yang mampu bersaing di pasar global termasuk di dalamnya wisata <i>Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition (MICE)</i>.</p> <p>7) Pengembangan yang terpadu dalam bidang <i>Trade, Tourism, and Investment (TTI)</i>.</p> <p>8) Pengembangan agrowisata secara profesional.</p> <hr/> <p>9) Menumbuhkan dan mengembangkan wisata minat khusus kegunungapian, maritim dan potensi alam maupun budaya khas lainnya untuk menjaring wisatawan dalam dan luar negeri.</p> <p>10) Peningkatan daya saing pariwisata daerah yang ditandai dengan kenaikan wisatawan tiap tahun (<i>growth oriented</i>).</p>

VISI	MISI	SASARAN	A R A H
1	2	3	4
<p>4. Lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera</p>	<p>4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.</p>	<p>a Terselenggarakannya pemerintahan yang profesional, demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum.</p> <p>b Terciptanya kelembagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang mantap.</p> <p>c Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah.</p> <hr/> <p>d Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat yang memadai.</p>	<p>1) Peningkatan <i>good governance</i> dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>2) Mewujudkan <i>cyber province</i> .</p> <p>3) Peningkatan kapasitas hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat.</p> <p>4) Fasilitasi upaya perolehan kepastian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).</p> <hr/> <p>5) Pembangunan dan pelayanan sistem transportasi dan prasarana wilayah yang dititikberatkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melayani perkembangan wilayah. - Peningkatan aktivitas perekonomian di daerah maupun antar daerah. - Peningkatan aksesibilitas sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata. - Mengurangi kesenjangan/ disparitas pertumbuhan regional. - Memperkuat keterkaitan antar wilayah dalam provinsi dan yang berbatasan.

VISI	MISI	SASARAN	A R A H
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan citra wilayah sebagai provinsi yang bertaraf internasional. - Memanfaatkan layanan kereta api sebagai pendukung transportasi wilayah disinergikan dengan moda transportasi lain yakni jalan dan udara. 6) Penciptaan transportasi yang efisien dan efektif secara terpadu untuk mendukung perekonomian, pendidikan, dan pariwisata. 7) Percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 8) Peningkatan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral untuk kesejahteraan rakyat. 9) Peningkatan fungsi konservasi dan perlindungan sumberdaya alam melalui optimalisasi fungsi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya alam, reboisasi dan penanggulangan resiko bencana. 10) Pengembangan pusat perbenihan (<i>seed center</i>) bagi komoditi pertanian secara luas. 11) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian dalam arti luas yang didukung oleh pemanfaatan lahan dan teknologi secara optimal.

VISI	MISI	SASARAN	A R A H
1	2	3	4
		<p>e Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif di Asia Tenggara.</p>	<p>12) Pengembangan sistem industri, dalam lingkup usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang ramah lingkungan (<i>non pollutant</i>) dan berbasis keluarga dan teknologi.</p> <p>13) Perlindungan terhadap lahan-lahan sentra penghasil utama pertanian dari ancaman pengalihan fungsi lahan dalam regulasi daerah.</p> <p>14) Pengembangan budidaya hasil pertanian secara selektif yang berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor.</p> <p>15) Modernisasi sarana perikanan darat dan laut serta sarana pengolahan hasil laut.</p> <hr/> <p>16) Mendorong dan memfasilitasi tumbuhkembangnya industri kreatif secara kompetitif.</p> <p>17) Fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan industri kreatif secara memadai.</p> <p>18) Mendorong peningkatan kualitas SDM bidang industri kreatif dengan melibatkan lembaga pendidikan dan profesional.</p> <p>19) Fasilitasi terbentuknya jejaring kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompeten, baik dalam negeri maupun luar negeri.</p>

VISI	MISI	SASARAN	A R A H
1	2	3	4
		<p>f Terpenuhinya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama.</p> <p>g Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, anak, dan remaja.</p> <hr/> <p>h Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi.</p> <p>i Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial dan kesehatan yang tinggi.</p>	<p>20) Peningkatan keharmonisan antar umat beragama dalam menjalankan kerukunan hidup beragama yang saling menghormati dan bertoleransi.</p> <p>21) Peningkatan pemahaman ajaran agama dalam pengamalannya sehingga penyimpangan terhadap ajaran agama dapat dicegah.</p> <p>22) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan remaja dari tindak kekerasan, praktek kejahatan ilegal serta pengaruh buruk sebagai dampak dari globalisasi.</p> <p>23) Peningkatan penghormatan terhadap perempuan dan memberikan peran dalam pembangunan serta memenuhi hak dasar dalam segala bidang (kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik).</p> <hr/> <p>24) Peningkatan kerjasama mendorong perekonomian rakyat.</p> <p>25) Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.</p> <p>26) Peningkatan ketahanan dan pelayanan sosial.</p> <p>27) Pengembangan sistem perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.</p>

VISI	MISI	SASARAN	A R A H
1	2	3	4
			<p>28) Pengurangan angka pengangguran</p> <p>29) Peningkatan produktivitas pekerja.</p> <p>30) Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.</p> <p>31) Penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.</p> <p>32) Peningkatan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja.</p> <p>33) Penciptaan kesempatan kerja melalui investasi, pengendalian distribusi penduduk dan peningkatan kualitas SDM.</p> <p>34) Pembangunan kesehatan.</p> <p>35) Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat.</p>

BAB V
TAHAPAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005 – 2025

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, rencana pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan tahapan dan prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan keutamaan permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan dalam penekanan titik berat. Prioritas menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas dapat disusun sebagai berikut:

A. LIMA TAHUN PERTAMA (2005-2009)

Penekanan pada lima tahun pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Meletakkan dasar sistem pendidikan berkualitas, berkeadilan, berdaya saing dan akuntabel dengan memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang didukung oleh upaya peningkatan kegiatan penelitian dan kapasitas lembaga pendidikan yang berstandar nasional/internasional, dengan prioritas pada:

- 1) Peletakan dasar pengembangan sistem pendidikan yang berbasis kompetensi;
 - 2) Perluasan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terutama untuk kaum perempuan dan kelompok masyarakat tidak mampu.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis moral dan budi pekerti serta berorientasi pada jiwa kepemimpinan dan profesionalisme untuk mewujudkan kualitas lulusan yang didukung upaya peningkatan mutu pendidik dan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung proses pembelajaran yang bermutu, dengan prioritas pada:
- 1) Pengupayaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Menyediakan layanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung proses pembelajaran, manajemen dan penelitian serta dalam upaya meningkatkan akses ke dunia global, dengan prioritas pada penyiapan layanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi.
- d. Menciptakan pola pendidikan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengembangkan tanggungjawab bersama, dengan prioritas pada peningkatan kerjasama untuk mengembangkan pola pendidikan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- e. Mengupayakan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan melalui pengembangan sarana penunjang pendidikan dalam upaya penciptaan suasana belajar yang nyaman, dengan prioritas pada:
- 1) Penanggulangan citra negatif DIY sebagai pusat pendidikan melalui pembinaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa;
 - 2) Peningkatan peran aktif dalam penataan wilayah dan ruang yang mendukung kebutuhan pengembangan pusat pendidikan.

- f. Melaksanakan pendidikan keolahragaan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas peserta didik, dengan prioritas pada peletakan dasar pola pelaksanaan pendidikan keolahragaan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas peserta didik.
2. Untuk mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Meningkatkan ketahanan dan daya saing kebudayaan di DIY, dengan prioritas pada:
 - 1) Peletakan dasar-dasar regulasi ketahanan budaya;
 - 2) Peletakan strategi daya saing kebudayaan.
 - b. Memelihara dan merehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagai ikon warisan budaya masa lalu, termasuk revitalisasi peran Kraton sebagai salah satu Pusat Pengembangan Kebudayaan Yogyakarta dan motor penggerak kebudayaan rakyat, dengan prioritas pada:
 - 1) Pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan kebudayaan;
 - 2) Restorasi kebudayaan yang tanggap terhadap perubahan global baik formal maupun non formal, baik pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebudayaan;
 - 4) Perwujudan pusat-pusat penelitian, perpustakaan Jawa, dan pengembangan kebudayaan yang dapat menjangkau semua perkembangan budaya di masyarakat;
 - 5) Pemahaman terhadap nilai-nilai kebudayaan melalui internalisasi, sosialisasi, edukasi pada jalur pendidikan formal, keluarga, masyarakat maupun melalui jalur media massa;
 - 6) Pengembangan gaya hidup masyarakat DIY yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas berdasarkan Pancasila.

- c. Menciptakan iklim yang kondusif untuk menciptakan kreativitas dan inovasi yang berbasis kebudayaan, dengan prioritas pada:
 - 1) Mewujudkan kebudayaan yang menjangkau semua perkembangan budaya di masyarakat;
 - 2) Menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas berbasis budaya;
 - 3) Memanfaatkan teknologi informatika dalam dokumentasi, kampanye, promosi untuk memantapkan jejaring kebudayaan, dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat;
 - 4) Mewujudkan kerjasama yang sinergis antara pusat-pusat pengembangan budaya dengan sektor-sektor lain, khususnya industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3. Untuk mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi obyek wisata dan memfungsikan serta mengembangkan obyek wisata potensial, dengan prioritas:
 - 1) Rehabilitasi dan rekonstruksi obyek wisata;
 - 2) Fasilitasi dan membangun kawasan wisata berbasis budaya dan pelestarian lingkungan;
 - 3) Perintisan dan pengembangan destinasi pariwisata potensial;
 - 4) Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata;
 - 5) Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui jejaring dan kemitraan;
 - 6) Pengembangan pemasaran/promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan di dalam dan luar negeri;
 - 7) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.

 - b. Mengembangkan inovasi produk wisata dan jenis produk pendukung pariwisata, dengan prioritas:

- 1) Peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata (sektor perhubungan, perdagangan dan jasa, agrowisata dan industri kecil);
 - 2) Pengembangan produk pariwisata meliputi pengembangan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata;
 - 3) Pengembangan wisata edukasi dan terpadu antar sektor.
4. Untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Membangun kesadaran sikap tanggap dan tanggung jawab masyarakat terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, dengan prioritas:
 - 1) Penguatan kepedulian masyarakat untuk meningkatkan ketahanan dan pelayanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - 2) Penyebarluasan informasi di seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Membentuk masyarakat yang mempunyai wawasan dan perilaku hidup sehat, aktif mengelola sanitasi lingkungan yang didukung penyuluh dan petugas kesehatan yang semakin profesional dan berdedikasi, dengan prioritas:
 - 1) Peningkatan wawasan masyarakat akan budaya hidup sehat dan prinsip-prinsip pencegahan gangguan kesehatan melalui sosialisasi;
 - 2) Peningkatan komitmen dan profesionalisme para penyuluh dan petugas kesehatan melalui diklat;
 - 3) Peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - 4) Fasilitasi sarana pendukung dan layanan kesehatan.
 - c. Mengurangi pengangguran melalui penciptaan dan pertumbuhan wirausaha yang prospektif didukung peningkatan investasi sektor ekonomi modern dan didukung dengan koordinasi kebijakan bidang kependudukan yang komprehensif, dengan prioritas:
 - 1) Peningkatan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha;

- 2) Peningkatan sarana permodalan;
 - 3) Peningkatan pelatihan ketrampilan;
 - 4) Penciptaan peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - 5) Pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan;
 - 6) Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha.
- d. Membangun citra transmigrasi di masyarakat sebagai pilihan yang menjanjikan peluang peningkatan kesejahteraan rumahtangga dengan mekanisme pemindahan dan penempatan yang efektif dan tepat waktu, dengan prioritas:
- 1) Peningkatan kualitas dan intensitas penyelenggaraan transmigrasi serta fasilitasi bagi transmigran;
 - 2) Penyebarluasan informasi melalui penyuluhan yang profesional;
 - 3) Penyusunan pola rekrutment dan pembekalan calon transmigran yang sistematis sesuai kebutuhan;
 - 4) Penyiapan penempatan lokasi yang tepat.
- e. Membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi, dengan prioritas pengembangan wawasan dan kesadaran kesetaraan gender di lapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- f. Menyediakan pelayanan sosial dan ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi pendukung, dengan prioritas:
- 1) Pemantapan tata ruang wilayah sebagai respon terhadap kebutuhan dinamika lokasi-lokasi peruntukan industri skala besar dan menengah, serta jenis-jenis industri prioritas;
 - 2) Penataan ruang bagi pertanian progresif, sistem agropolitan, permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - 3) Penataan ruang yang memadukan jaringan infrastruktur dan pelayanan sosial ekonomi wilayah;

- 4) Peningkatan pelayanan sistem transportasi wilayah melalui sinergitas antar moda guna mendukung perekonomian pendidikan dan pariwisata;
 - 5) Pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta pengembangan energi alternatif untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat
- g. Pengembangan sistem industri yang ramah lingkungan di lingkup usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi berbasis keluarga, teknologi yang berkualitas, inovatif, dan jangkauan pemasaran yang lebih luas, sumberdaya manusia yang terampil, dengan motivasi usaha dan kewirausahaan yang kuat, didukung lembaga pelatihan dan pendidikan yang maju dan berkembang, dengan prioritas:
- 1) Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial;
 - 2) Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya potensi industri kreatif;
 - 3) Peningkatan ketrampilan dan pemanfaatan secara nyata;
 - 4) Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal;
 - 5) Peningkatan inovasi produk dan jangkauan pemasarannya;
 - 6) Pengembangan bidang industri kerajinan dan industri kreatif dengan melibatkan lembaga pendidikan dan profesional;
 - 7) Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompeten baik dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Peningkatan budidaya pertanian serta mengelola dan melindungi lahan-lahan subur pertanian dari tekanan alih fungsi pertanian ke non pertanian, dengan prioritas:
- 1) Optimalisasi pusat-pusat perbenihan;
 - 2) Perlindungan lahan-lahan pertanian subur, produktif, dan beririgasi dari proses konversi ke non-pertanian;
 - 3) Peningkatan budidaya, produksi, produktifitas, dan mutu produk pertanian yang berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor.

- i. Menumbuhkan unit-unit usaha dan sentra budidaya ikan; benih, konsumsi, dan ikan hias, disertai keragaman produksi, dan produktivitas perikanan, dengan prioritas:
 - 1) Penentuan dan pemantapan lokasi sentra-sentra pembibitan ikan, budidaya ikan hias dan ikan konsumsi;
 - 2) Pelatihan keahlian dan motivasi petani budidaya ikan air tawar, air laut, dan perikanan tangkap;
 - 3) Peningkatan pengolahan hasil laut dan konsumsi ikan di masyarakat.
- j. Menentukan wilayah prioritas pengembangan hutan berdasarkan berbagai fungsi, baik hutan konservasi, maupun hutan produksi, dan hutan untuk penyelamatan lingkungan, dengan prioritas:
 - 1) Penetapan kawasan hutan untuk berbagai fungsi pada unit-unit wilayah;
 - 2) Pembangunan hutan taman kota;
 - 3) Optimalisasi, rehabilitasi dan konservasi fungsi hutan untuk penyelamatan lingkungan bagi kepentingan kehidupan generasi mendatang;
 - 4) Peningkatan budidaya, produksi, produktifitas, dan mutu produk perkebunan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- k. Memantapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya kelembagaan sosial, politik, ekonomi yang mantap serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban dan haknya, dengan prioritas:
 - 1) Menjalin komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam hubungan kerja antar lembaga pemerintahan baik vertikal maupun antar bidang;
 - 2) Peningkatan forum komunikasi dan saling tukar informasi;
 - 3) Penguatan komitmen dan kerjasama yang sinergi antar lembaga/bidang baik dalam daerah maupun antar daerah;
 - 4) Peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan sumberdaya aparatur, dengan titik berat:

- a) Sistem rekrutmen SDM Pemerintahan (PNS) sesuai dengan kebutuhan kerja dan berbasis keahlian secara berkelanjutan;
 - b) Sistem peningkatan kualitas SDM Pemerintahan (PNS) melalui diklat, kursus-kursus kepemimpinan dan upaya-upaya lainnya secara berkelanjutan.
- 5) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
 - 6) Penciptaan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - 7) Pemahaman manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.

B. LIMA TAHUN KEDUA (2010-2014)

Penekanan pada lima tahun kedua adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect and forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing unggul, dan didukung oleh lembaga pendidikan yang bermutu tinggi, dengan prioritas pada penerapan standar lembaga pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan.
 - b. Memperluas pelayanan pendidikan dan pemberlakuan subsidi silang, dengan prioritas pada perluasan pelayanan pendidikan pada daerah tertinggal dan masyarakat kurang mampu.

- c. Menerapkan dan meningkatkan kurikulum pendidikan yang mendukung peningkatan pencapaian kompetensi dan pengembangan karakter lulusan, dengan prioritas pada peningkatan pencapaian kompetensi dan relevansi lulusan melalui pengembangan mutu kurikulum berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul.
- d. Meningkatkan peran perpustakaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan, dengan prioritas pada revitalisasi fungsi dan peran perpustakaan.
- e. Menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam pendirian pusat teknologi dan industri (*Techno-Industrial Park*) sebagai katalisator industri berbasis sains (*science-based industries*) di Yogyakarta, dengan prioritas pada perwujudan berdirinya pusat teknologi dan industri (*Techno-Industrial Park*).
- f. Meningkatkan sertifikasi guru dan dosen serta tenaga kependidikan lainnya, dengan prioritas pada peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- g. Meningkatkan budaya belajar dan membaca pada semua lapisan masyarakat, dengan prioritas pada peningkatan gemar belajar dan membaca sebagai bagian dari budaya masyarakat.
- h. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan, dengan prioritas pada pembelajaran berbasis penelitian yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- i. Mengembangkan pendidikan multikultur dalam upaya peningkatan wawasan, keterbukaan, dan toleransi, dengan prioritas pada pengembangan pendidikan multikultur sebagai modal dasar untuk mendukung DIY sebagai tujuan pendidikan baik dari luar daerah maupun luar negeri.
- j. Mendorong dalam perwujudan penataan lingkungan kawasan dan penataan ruang yang mendukung pengembangan pendidikan, dengan prioritas pada sinkronisasi program-program pendidikan dan penataan ruang.
- k. Meningkatkan pencapaian kesetaraan pendidikan (laki-laki dan perempuan), dengan prioritas pada pengembangan budaya kompetisi dan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan.

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana, dengan prioritas pada sosialisasi pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap bencana melalui berbagai media pendidikan.
 - m. Meningkatkan sarana olah raga dan kesehatan yang memadai dalam menunjang proses pendidikan, dengan prioritas pada peningkatan sarana olah raga dan kesehatan di lingkungan lembaga pendidikan.
2. Untuk mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Mewujudkan sistem pengembangan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh sistem informasi yang efisien dan mempunyai jaringan luas, dengan prioritas pada:
 - 1) Membangun kemitraan dan partisipasi yang sehat dan berkelanjutan antar *stakeholders* yang terlibat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan;
 - 2) Mewujudkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang sehat dan luhur.
 - b. Terwujudkannya pengembangan dan pelestarian dan mengembangkan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah, dengan prioritas pada:
 - 1) Penyelenggaraan *event* kebudayaan yang dinamis, unik, berkelas dunia, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke DIY;
 - 2) Penyediaan dokumen teknis implementasi, dan sosialisasi, standarisasi pengelolaan basis data dan informasi kebudayaan daerah;
 - 3) Peningkatan upaya penghargaan pemerintah terhadap aktivis-aktivis pelestari, pengembang, dan pewaris budaya, termasuk di dalamnya mengidentifikasi dan mendaftarkan hak paten atas hasil karya budaya Yogyakarta;

- 4) Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam upaya pencapaian gaya hidup yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas.
3. Untuk mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Membangun perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata dan sektor pendukung, dengan prioritas:
 - 1) Peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukungnya;
 - 2) Pengembangan usaha pariwisata;
 - 3) Meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan dan pendukung pariwisata dalam pengembangan dan kelestarian obyek pariwisata, dengan titik berat:
 - a) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan pariwisata, pengembangan dan kelestarian obyek pariwisata;
 - b) Pengembangan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kerajinan pendukung kegiatan pariwisata seiring dengan adanya peningkatan modal terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan prioritas pada:
 - 1) Peningkatan industri kerajinan pendukung pariwisata dan fasilitasi permodalan bagi UKM;
 - 2) Meningkatnya promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan titik berat pada pengembangan pemasaran/promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan;
 - 3) Meningkatnya jejaring pariwisata, dengan titik berat pada:
 - a) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata;
 - b) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.

4. Untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Membentuk kelembagaan lokal dan unit kelompok masyarakat yang peduli akan masalah kesejahteraan sosial yang aktif dan terhubung oleh jaringan kerja, dengan prioritas:
 - 1) Pemberdayaan dan upaya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok guna meningkatkan ketahanan dan pelayanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - 2) Penciptaan lingkungan masyarakat yang terhubung dalam jaringan sukarelawan;
 - 3) Peningkatan pengabdian kesejahteraan sosial;
 - 4) Perintisan jaminan sosial untuk masyarakat.
 - b. Memperbaiki dan meratakan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan, baik dalam hal jarak jangkauan yang lebih dekat maupun biaya yang lebih murah khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah, masyarakat perdesaan terpencil (termasuk wilayah perbatasan), maupun masyarakat di lingkungan marginal kota, dengan prioritas:
 - 1) Peningkatan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh pelosok;
 - 2) Peningkatan profesionalisme sumberdaya kesehatan yang melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok;
 - 3) Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
 - c. Menjalinkan kerjasama antar daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja antar daerah dan antar usaha sektor ekonomi untuk saling mencukupi kebutuhan tenaga kerja, serta aliran investasi, dengan prioritas:
 - 1) Peningkatan kegiatan usaha yang mendukung karakter wilayah sebagai pusat pendidikan dan pariwisata;
 - 2) Peningkatan dorongan berwirausaha bagi masyarakat;
 - 3) Pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan;
 - 4) Terpeliharanya hubungan industrial.

- d. Membentuk kemandirian dalam penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan kerjasama yang mutualistis dengan daerah-daerah penempatan yang memberikan jaminan dan peluang perbaikan ekonomi transmigran serta pembangunan sosial-ekonomi wilayah daerah penempatan, dengan prioritas:
- 1) Penguatan kerjasama dan kemitraan antara daerah penempatan dengan daerah pengirim sesuai prinsip pemenuhan kebutuhan (*demand-supply*);
 - 2) Penguatan jaminan keberhasilan usaha dan peluang perbaikan ekonomi transmigran serta pembangunan sosial-ekonomi wilayah daerah penempatan.
- e. Mewadahi aspirasi perempuan dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan peran perempuan dalam kegiatan sosial, maupun ekonomi produktif, serta terbentuknya kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif, dengan prioritas:
- 1) Pengembangan aspirasi dan peran perempuan dalam kegiatan sosial maupun ekonomi;
 - 2) Peningkatan kemampuan perempuan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan dirinya;
 - 3) Peningkatan dukungan terbentuknya kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif.
- f. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui investasi, membuka usaha ekonomi produktif pada lokasi industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai, dengan prioritas:
- 1) Penguatan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata;
 - 2) Pengembangan budaya daerah dan menjadikan lokasi-lokasi industri sebagai kunjungan dan atraksi wisata;
 - 3) Pemanfaatan infrastruktur dan jaringan ekonomi sesuai dengan peruntukan dan prioritasnya;
 - 4) Pemantapan sistem jaringan transportasi yang sinergi inter dan antar moda;
 - 5) Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam.

- g. Meningkatkan komoditas produk industri di lingkup usaha, mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri kreatif yang khas dan orisinal, didukung lokasi-lokasi kegiatan industri yang berperan sebagai daya tarik kunjungan dan atraksi wisata daerah, dengan prioritas:
- 1) Pemasyarakatan peraturan dan penerapan tata ruang wilayah yang tanggap dini terhadap perkembangan dan dinamika sosial ekonomi di masa depan;
 - 2) Peningkatan peluang investasi disertai jaminan fasilitas dan kemudahan prosedur;
 - 3) Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif untuk mendorong perekonomian rakyat;
 - 4) Mempertahankan dan mengembangkan kerjasama kemitraan, baik dalam maupun luar negeri.
- h. Membentuk sistem budidaya pertanian yang menjamin kebutuhan pangan penduduk serta berkembangnya jenis-jenis komoditas pertanian yang lebih teragamkan (diversifikasi), bernilai ekonomi lebih tinggi (komersial) serta kompetitif dari segi kualitas produknya termasuk produk pertanian lahan kota, dengan prioritas:
- 1) Pemanfaatan benih unggul guna meningkatkan pendapatan petani;
 - 2) Mempertahankan lahan pertanian sebagai upaya meningkatkan produktifitas pertanian;
 - 3) Penganekaragaman jenis komoditas pertanian yang mempunyai nilai komersial dan menguntungkan;
 - 4) Peningkatan pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
- i. Meningkatkan konsumsi dan permintaan produk ikan dari dunia usaha dan masyarakat, dengan prioritas:
- 1) Peningkatan keterampilan pelatihan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan;
 - 2) Peningkatan pemasaran dan tata niaga produk ikan;
 - 3) Penyebarluasan/kampanye/sosialisasi mengkonsumsi ikan di masyarakat;
 - 4) Pengembangan budidaya ikan air tawar, air laut, dan peningkatan kemampuan petani perikanan tangkap.

- j. Menjaga dan melestarikan pertumbuhan tanaman hutan serta tersedianya produk hutan dan hasil ikutan hutan untuk kebutuhan dunia usaha dan rumahtangga serta terbentuknya kelompok-kelompok pelestari hutan, dengan prioritas:
- 1) Peningkatan produksi hasil hutan;
 - 2) Pengoptimalisasian pertumbuhan tegakan kawasan hutan melalui peran masyarakat secara terstruktur;
 - 3) Pemberian sosialisasi pelestarian hutan di lingkungan pendidikan dasar menengah;
 - 4) Pengelolaan dan pengembangan hutan taman kota;
 - 5) Pemanfaatan produksi perkebunan yang berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor.
- k. Merumuskan peraturan dan ketentuan teknis kompetensi dalam pembagian urusan untuk mengurangi tumpang-tindih dan konflik kepentingan sebagai tindak lanjut otonomi pemerintahan daerah, dengan prioritas:
- 1) Pengembangan komunikasi, integrasi sinkronisasi, dan sinergi antar lembaga pemerintah;
 - 2) Pengurangan tumpang-tindih kewenangan dan yurisdiksi serta konflik kepentingan antar daerah, antara daerah dan pusat, antar bidang, dan antar lembaga melalui peraturan dan ketentuan teknis kompetensi dan pembagian urusan;
 - 3) Memantapkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, dengan titik berat pada penguasaan teknologi informasi oleh seluruh jajaran pegawai pemerintahan sebagai basis utama pelayanan publik;
 - 4) Peningkatan dan pengembangan jejaring kemitraan antar *stakeholder*;
 - 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan, otonomi daerah, pemerintahan umum, dan sumberdaya aparatur, dengan titik berat pada peningkatan kualitas SDM Pemerintahan (PNS) untuk mencapai profesionalisme kinerja pegawai guna mendukung layanan publik yang prima;
 - 6) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum;
 - 7) Peningkatan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.

C. LIMA TAHUN KETIGA (2015-2019)

Penekanan pada lima tahun ketiga adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui penerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Memperkuat sistem dan lembaga pendidikan melalui model kerjasama antar lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan prioritas pada pelaksanaan reorientasi pendidikan dan pengembangan kerjasama untuk mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing tinggi.
 - b. Memeratakan pelayanan pendidikan dengan dibarengi pemerataan kualitas pendidikan, dengan prioritas pada pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah DIY pada semua jenjang pendidikan.
 - c. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dengan prioritas pada peningkatan standar kompetensi lulusan, pengembangan profesionalisme dan jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.
 - d. Mengembangkan kluster wilayah pendidikan, dengan prioritas pada pencapaian efisiensi penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan spesifikasi pendidikan.
 - e. Menerapkan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada layanan pemerintahan yang mendukung peningkatan layanan, pengetahuan dan wawasan seluruh lapisan masyarakat, dengan prioritas pada pengembangan layanan/media pendidikan dan pengetahuan melalui pemanfaatan TIK untuk mendukung perwujudan "*Cyber Province*".
 - f. Menerapkan sistem pendidikan yang mampu mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan untuk membekali lulusan siap kerja dan membuka kesempatan kerja, dengan prioritas pada pengembangan pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja dan siap membuka kesempatan kerja.

- g. Memantapkan kualitas pendidikan guru dan dosen, dengan prioritas pada peningkatan standar kualitas (standar nasional dan internasional) dan mengembangkan budaya kompetisi.
- h. Mengembangkan pendidikan non formal berbasis masyarakat dan berciri budaya lokal, dengan prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan masyarakat pada umumnya, perlu dikembangkan pendidikan non formal berbasis masyarakat dan berciri budaya lokal.
- i. Mengembangkan jaringan kerjasama internasional, dengan prioritas pada peningkatan jaringan kerjasama penelitian internasional dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan melalui kegiatan penelitian.
- j. Melibatkan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal, dengan prioritas pada pemberian peluang penuh keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal.
- k. Menciptakan sinergi antara berbagai lingkungan masyarakat dalam mendukung pemanfaatan ruang yang menunjang terselenggaranya pengembangan pendidikan, dengan prioritas pada pengembangan sinergi pemanfaatan ruang guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- l. Memantapkan kualitas pendidikan dan ketrampilan kaum perempuan, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan bagi kaum perempuan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pelaku pendidikan lainnya.
- m. Membentuk lembaga/kelompok penanganan dan antisipasi bencana, dengan prioritas pada pembentukan lembaga/kelompok penanganan dan antisipasi bencana di lingkungan masyarakat.
- n. Memantapkan peserta didik yang sehat dan berkualitas, dengan prioritas pada pengkondisian peserta didik yang sehat dan berkualitas, jasmani dan rohani pada setiap jenjang pendidikan.

2. Untuk mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Terselenggaranya proses perkembangan budaya yang sehat dan terhormat di semua lapisan masyarakat yang ditopang oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan pusat-pusat pengembangan kebudayaan lainnya, dengan prioritas pada:
 - 1) Peningkatan jumlah, ragam, dan mutu pelaku dan kegiatan budaya yang berbasis masyarakat di seluruh DIY;
 - 2) Mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan;
 - 3) Penyelenggaraan sistem pengelolaan budaya yang berbasis masyarakat yang terkait secara sinergis dengan pemerintah.
 - b. Terlaksananya partisipasi secara penuh dan peningkatan kesadaran yang tinggi di semua lapisan masyarakat akan pentingnya kelestarian dan perlindungan kawasan dan cagar budaya, dengan prioritas pada:
 - 1) Terwujudkannya “kantong-kantong” kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat;
 - 2) Memantapkan dan membangun kesinambungan kemitraan dan partisipasi dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan.
3. Untuk mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang didukung oleh lingkungan yang aman dan nyaman, dengan prioritas:
 - 1) Peningkatan iklim usaha kepariwisataan;
 - 2) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pariwisata;
 - 3) Pengembangan pemasaran/promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan;
 - 4) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata;

- 5) Pemantapan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang kondusif.
- b. Meningkatnya pengelolaan obyek wisata oleh masyarakat yang sinergis dan terintegrasi dengan pemerintah dan swasta, dengan prioritas:
- 1) Fasilitasi dan pembinaan pada lembaga kepariwisataan;
 - 2) Peningkatan jejaring pariwisata;
 - 3) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan pariwisata;
 - 4) Tersedianya infrastruktur dan fasilitas pendukung ODTW dari semua sektor baik yang difasilitasi pemerintah, swasta maupun masyarakat, dengan titik berat pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung ODTW;
 - 5) Meningkatnya kualitas SDM pendukung kegiatan pariwisata terkait dengan peningkatan pendidikan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan mutu pelayanan (*sapta pesona*), dengan titik berat pada peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata;
 - 6) Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan *event* kegiatan wisata;
 - 7) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan pariwisata, pengembangan dan kelestarian obyek pariwisata;
 - 8) Meningkatnya peran seluruh lapisan masyarakat dalam ikut serta mempromosikan kegiatan pariwisata;
 - 9) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata.
4. Untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Menyediakan sarana penanganan masalah kesejahteraan sosial didukung petugas dan relawan yang berkemampuan pada unit-unit kelompok peduli kesejahteraan sosial di masing-masing lingkungan masyarakat, dengan prioritas:

- 1) Penyediaan unit-unit fasilitas kesejahteraan sosial untuk konseling;
 - 2) Peningkatan pelayanan dan koordinasi tindakan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
 - 3) Pendampingan petugas kesejahteraan yang profesional dan berkompeten dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat;
 - 4) Pemantapan jaringan sosial untuk masyarakat.
- b. Meningkatkan jumlah dan spesialisasi sumberdaya manusia di bidang pelayanan kesehatan, didukung penggunaan dan penerapan teknologi kesehatan yang terkini, serta perbaikan dalam sarana-prasarana pelayanan kesehatan, dengan prioritas:
- 1) Peningkatan jumlah dan keahlian spesialisasi sumberdaya manusia di bidang kesehatan;
 - 2) Pemerataan distribusi tenaga profesional yang didukung pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi kesehatan yang terkini;
 - 3) Peningkatan kepedulian terhadap kesehatan reproduksi.
- c. Meningkatnya kualitas, etos, dan produktivitas tenaga kerja didukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan menuju terwujudnya hubungan industrial yang lebih mutualistik, humanis, harmonis, dan progresif, dengan prioritas:
- 1) Perluasan akses ketenagakerjaan di segala bidang;
 - 2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
 - 3) Peningkatan pengaturan, perlindungan, pengawasan, dan jaminan kerja.
- d. Meningkatnya minat transmigrasi secara swakarsa baik untuk bidang usaha budidaya tanaman, perikanan, industri, jasa, maupun tenaga kerja sektor konstruksi, diperkuat oleh pemerintah melalui dukungan modal material dan pelatihan ketrampilan usaha, dengan prioritas:
- 1) Peningkatan minat dan motivasi penduduk untuk berpartisipasi dalam program transmigrasi secara swakarsa;
 - 2) Peningkatan pilihan kegiatan ekonomi transmigran yang beragam;

- 3) Peningkatan pemberian bantuan subsidi dan fasilitas untuk bidang usaha budidaya tanaman, perikanan, industri, jasa, maupun tenaga kerja sektor konstruksi;
 - 4) Peningkatan peran pemerintah dengan dukungan modal material dan pelatihan ketrampilan usaha.
- e. Mewujudkan kultur kesetaraan gender untuk mengatasi persoalannya dan berperan nyata dalam lingkungan masyarakatnya, dengan prioritas peningkatan kemandirian perempuan untuk mengatasi persoalannya, mensejahterakan dirinya (*self-help*) melalui pendidikan dan pelatihan di masyarakat.
- f. Mengintegrasikan ekonomi produktif serta pusat-pusat pertumbuhan baru dalam sistem jaring infrastruktur dan komunikasi untuk mempermudah transportasi input produksi dan pemasaran hasil produksi, serta terbentuknya kawasan agropolitan, dengan prioritas:
- 1) Peningkatan peluang bagi industri kecil dan kerajinan rakyat terkait dengan sumber-sumber pemasaran regional, nasional, dan internasional;
 - 2) Pemantapan penyediaan infrastruktur publik yang selaras dengan pusat-pusat pertumbuhan baru;
 - 3) Pemanfaatan sumberdaya alam yang memperhatikan pelestarian lingkungan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
- g. Meningkatkan komoditas, produk industri kecil, kerajinan rakyat, koperasi dan industri kreatif yang menjangkau pasar lebih luas dan berkualitas, di tingkat regional, nasional, dan internasional, dengan prioritas:
- 1) Akselerasi, optimalisasi, dan integrasi proses kegiatan sosial ekonomi, permukiman, dan industri kreatif dengan dinamika pembangunan tata-ruang, serta ketersediaan infrastruktur wilayah didukung pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral;
 - 2) Mempertahankan dan mengembangkan peluang investasi;
 - 3) Perkuatan industri kreatif menuju pasar internasional;
 - 4) Perkuatan jejaring dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.

- h. Membentuk sikap petani yang berorientasi kemajuan dan keuntungan (petani *progressive*) serta mudah menerima pengenalan metode tanam, teknologi, maupun komoditas yang lebih maju, dengan prioritas:
- 1) Peningkatan jiwa usaha, *proressivitas* dan *adoptivitas* petani dalam merespon permintaan dan peluang pasar didukung perbaikan infrastruktur dan permodalan;
 - 2) Mempertahankan lahan pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian;
 - 3) Pengembangan benih unggul menuju pasar dalam negeri;
 - 4) Perkuatan pembangunan industri pengolahan dan peningkatan keanekaragaman yang mempunyai nilai komersial dan menguntungkan.
- i. Meningkatnya produktivitas perikanan dan peningkatan kualitas sehingga memperluas jangkauan pemasaran produk perikanan ke pasar swalayan, supermarket, pasar luar daerah, dan ekspor, dengan prioritas:
- 1) Pengawasan standar kualitas, kesehatan produk, dan sanitasi kolam budidaya untuk memperluas dan meningkatkan jangkauan pemasaran;
 - 2) Pengembangan usaha pengolahan produk ikan;
 - 3) Pembudayaan gemar makan ikan;
 - 4) Perkuatan budidaya ikan air tawar, air laut, dan kemandirian nelayan perikanan tangkap.
- j. Mewujudkan hutan yang berkembang dan lebih dinamis dengan flora dan fauna yang lebih variatif, serta fasilitas pendukung optimalisasi fungsi hutan dalam perbaikan kualitas lingkungan, kebersihan udara, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan prioritas:
- 1) Pengembangan, perluasan, dan pengayaan hutan untuk jenis-jenis flora dan fauna yang langka dan atraktif sebagai bagian penganekaragaman hayati;
 - 2) Perluasan pemanfaatan hutan untuk peningkatan pendapatan petani hutan melalui tanaman tegakan;
 - 3) Perluasan hutan taman kota sebagai paru-paru kota;
 - 4) Peningkatan produksi perkebunan.

- k. Menjalinkan kerjasama antar lembaga dilandasi kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pelayanan terbaik dan pencapaian rencana dan program pembangunan daerah, dengan prioritas:
- 1) Penguatan pemahaman atas situasi nyata sistem dan etika birokrasi serta pemerintahan;
 - 2) Penguatan jalinan kerjasama antar lembaga dilandasi kompetensi dan komitmen yang tinggi;
 - 3) Peningkatan pelayanan terbaik dan pencapaian rencana dan program, dan mewujudkan keterpaduan multi sektor untuk merumuskan solusi dan alternatif pembangunan daerah;
 - 4) Perkuatan komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam hubungan kerja antar lembaga pemerintahan baik vertikal maupun antar bidang;
 - 5) Perkuatan pengembangan kapasitas kelembagaan, otonomi daerah, pemerintahan umum, dan sumberdaya aparatur;
 - 6) Perkuatan kinerja birokrasi pemerintahan yang pro bisnis untuk mendukung percepatan pengembangan dunia usaha;
 - 7) Perkuatan pelayanan publik lewat pemanfaatan teknologi informasi;
 - 8) Perkuatan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - 9) Perkuatan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.

D. LIMA TAHUN KEEMPAT (2020-2025)

Penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, dengan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam bidang pendidikan.
 - b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
 - c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan.
 - d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional.
 - e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi.
 - f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas.

- g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional, dengan prioritas pada upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.
 - h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (*knowledge society*), dengan prioritas pada perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.
 - i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan *riset-riset* unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”.
 - k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
 - l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan.
 - m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan.
 - n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga.
2. Untuk mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada:
 - 1) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya;
 - 2) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
 - 3) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, moderen, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.
 - b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan prioritas pada:
 - 1) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan;
 - 2) Mempertahankan dan mengembangkan “kantong-kantong” kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat;
 - 3) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
 - 4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam *event* budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia.
3. Untuk mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman, dengan prioritas:
 - 1) Fasilitasi wisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE);
 - 2) Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu;

- 3) Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional;
 - 4) Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan;
 - 5) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pariwisata.
- b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata, dengan prioritas:
- 1) Pengembangan produk Pariwisata;
 - 2) Pengembangan pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Pengembangan usaha pariwisata;
 - 4) Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di luar negeri, dengan titik berat:
 - a) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata;
 - b) Pengembangan informasi pasar wisatawan;
 - c) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.
 - 5) Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, dengan titik berat:
 - a) Promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan;
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata.
 - 6) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, dengan titik berat pada peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung pariwisata;

- 7) Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal, dengan titik berat:
 - a) Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan pariwisata;
 - b) Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan.

4. Untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat, maka tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan prioritas:
 - 1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;
 - 2) Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 3) Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat;
 - 4) Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat.
 - b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan, dengan prioritas:
 - 1) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;
 - 2) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumahtangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik;
 - 3) Peningkatan wawasan masyarakat yang responsive terhadap penyakit menular.
 - c. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan yang memenuhi basis kultural, standarisasi, kompetensi, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional maupun internasional.

- d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif, dengan prioritas pemenuhan pelayanan dan mekanisme perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui program transmigrasi yang transparan berlangsung secara teratur.
- e. Meningkatkan keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal.
- f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat, dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.
- g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (*craftmanship*) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi, dengan prioritas:
 - 1) Pemantapan budaya berkerajinan (*craftsmanship*) didukung pemantapan standard mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif.
 - 2) Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar
- h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, dengan prioritas perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong.

- i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan, dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.
- j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dengan prioritas:
 - 1) Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata;
 - 2) Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian.
- k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, dengan prioritas:
 - 1) Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat dialogis untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan;
 - 2) Penanganan masalah pembangunan secara terpadu;
 - 3) Peningkatan reputasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat;
 - 4) Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas;
 - 5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional, dengan titik berat pada:
 - a) Terpenuhinya SDM Pemerintahan (PNS) yang profesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang keahliannya;
 - b) Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan (PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang prima.
 - 6) Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat;
 - 7) Membudayanya manajemen penanggulangan dan pencegahan bencana.

E. MATRIK TAHAPAN - PRIORITAS RPJPD TAHUN 2005 - 2025

FILOSOFI: Hamemayu Hayuning Bawana

VISI: Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Penekanan pada lima tahun pertama adalah: pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi-potensi unggulan, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:</p>		<p>Penekanan pada lima tahun kedua adalah: pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (<i>backward effect and forward effect</i>) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:</p>		<p>Penekanan pada lima tahun ketiga adalah: pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:</p>		<p>Penekanan pada lima tahun keempat adalah: penguatan upaya pencapaian unggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi, yang diuraikan pada masing-masing misi, sebagai berikut:</p>	

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI I:							
Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal							
1. Meletakkan dasar sistem pendidikan berkualitas, berkeadilan, berdaya saing dan akuntabel dengan memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang didukung oleh upaya peningkatan kegiatan penelitian dan kapasitas lembaga pendidikan yang berstandar nasional/ internasional.	a. Peletakan dasar pengembangan sistem pendidikan yang berbasis kompetensi. b. Perluasan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terutama untuk kaum perempuan dan kelompok masyarakat tidak mampu.	1. Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing unggul, dan didukung oleh lembaga pendidikan yang bermutu tinggi.	- Penerapan standar lembaga pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan.	1. Menguatkan sistem dan lembaga pendidikan melalui model kerjasama antar lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri.	- Pelaksanaan reorientasi pendidikan dan pengembangan kerjasama untuk mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdayasaing.	1. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara.	- Pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang pendidikan.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis moral dan budi pekerti serta berorientasi pada jiwa kepemimpinan dan profesionalisme untuk mewujudkan kualitas lulusan yang didukung upaya peningkatan mutu pendidik dan upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna mendukung proses pembelajaran yang bermutu.	a. Pengupayaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.	2. Memperluas pelayanan pendidikan dan pemberlakuan subsidi silang.	- Perluasan pelayanan pendidikan pada daerah tertinggal dan masyarakat kurang mampu.	2. Memeratakan pelayanan pendidikan dengan dibarengi pemerataan kualitas pendidikan.	- Pemerataan kualitas pendidikan di semua wilayah DIY pada semua jenjang pendidikan.	2. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya.	- Penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Menyediakan layanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung proses pembelajaran, manajemen dan penelitian serta dalam upaya meningkatkan akses ke dunia global.	- Penyiapan layanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi.	3. Menerapkan dan meningkatkan kurikulum pendidikan yang mendukung peningkatan pencapaian kompetensi dan pengembangan karakter lulusan.	- Peningkatan pencapaian kompetensi dan relevansi lulusan melalui pengembangan mutu kurikulum berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul.	3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja.	- Peningkatan standar kompetensi lulusan, pengembangan profesionalisme dan jiwa kepemimpinan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.	3. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator).	- Pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Menciptakan pola pendidikan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mengembangkan tanggungjawab bersama.	- Peningkatan kerjasama untuk mengembangkan pola pendidikan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.	4. Meningkatkan peran perpustakaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan.	- Revitalisasi fungsi dan peran perpustakaan.	4. Mengembangkan kluster wilayah pendidikan.	- Pencapaian efisiensi penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan spesifikasi pendidikan.	4. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing.	- Peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Mengupayakan lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan melalui pengembangan sarana penunjang pendidikan dalam upaya penciptaan suasana belajar yang nyaman.	<p>a. Penanggulangan citra negatif DIY sebagai pusat pendidikan melalui pembinaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa.</p> <p>b. Peningkatan peran aktif dalam penataan wilayah dan ruang yang mendukung kebutuhan pengembangan pusat pendidikan.</p>	5. Menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam pendirian pusat teknologi dan industri (<i>Techno-industrial Park</i>) sebagai katalisator industri berbasis sains (<i>science-based industries</i>) di Yogyakarta.	- Perwujudan berdirinya pusat teknologi dan industri (<i>Techno-industrial Park</i>).	5. Menerapkan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada layanan pemerintahan yang mendukung peningkatan layanan, pengetahuan dan wawasan seluruh lapisan masyarakat.	- Pengembangan layanan/media pendidikan dan pengetahuan melalui pemanfaatan TIK untuk mendukung perwujudan "Cyber Province".	5. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama.	- Pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Melaksanakan pendidikan keolahragaan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas peserta didik.	- Peletakan dasar pola pelaksanaan pendidikan keolahragaan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas peserta didik.	6. Meningkatkan sertifikasi guru dan dosen serta tenaga kependidikan lainnya. 7. Meningkatkan budaya belajar dan membaca pada semua lapisan masyarakat.	- Peningkatan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. - Peningkatan gemar belajar dan membaca sebagai bagian dari budaya masyarakat.	6. Menerapkan sistem pendidikan yang mampu mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan untuk membekali lulusan siap kerja dan membuka kesempatan kerja. 7. Memantapkan kualitas pendidikan guru dan dosen.	- Pengembangan pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja dan siap membuka kesempatan kerja. - Peningkatan standar kualitas (strandar nasional dan internasional) dan mengembangkan budaya kompetisi.	6. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha. 7. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional.	- Penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas. - Upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>8. Menyelenggarakan dan meningkatkan pembelajaran berbasis penelitian pada semua jenjang pendidikan.</p> <p>9. Mengembangkan pendidikan multikultur dalam upaya peningkatan wawasan, keterbukaan, dan toleransi.</p>	<p>- Pembelajaran berbasis penelitian yang memberikan manfaat kepada masyarakat.</p> <p>- Pengembangan pendidikan multikultur sebagai modal dasar untuk mendukung Provinsi DIY sebagai tujuan pendidikan baik dari luar daerah maupun luar negeri.</p>	<p>8. Mengembangkan pendidikan non formal berbasis masyarakat dan berciri budaya lokal.</p> <p>9. Mengembangkan jaringan kerjasama internasional.</p>	<p>- Peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan masyarakat pada umumnya, perlu dikembangkan pendidikan non formal berbasis masyarakat dan berciri budaya lokal.</p> <p>- Peningkatan jaringan kerjasama penelitian internasional dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan melalui kegiatan penelitian.</p>	<p>8. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (<i>knowledge society</i>).</p> <p>9. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan.</p>	<p>- Perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.</p> <p>- Penciptaan riset-riset unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>10. Mendorong dalam perwujudan penataan lingkungan kawasan dan penataan ruang yang mendukung pengembangan pendidikan.</p> <p>11. Meningkatkan pencapaian kesetaraan pendidikan (laki-laki dan perempuan).</p>	<p>- Sinkronisasi program-program pendidikan dan penataan ruang.</p> <p>- Pengembangan budaya kompetisi dan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan.</p>	<p>10. Melibatkan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal.</p> <p>11. Menciptakan sinergi antara berbagai lingkungan masyarakat dalam mendukung pemanfaatan ruang yang menunjang terselenggaranya pengembangan pendidikan.</p>	<p>- Pemberian peluang penuh keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal.</p> <p>- Pengembangan sinergi pemanfaatan ruang guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.</p>	<p>10. Menciptakan gerakan peduli pendidikan.</p> <p>11. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman.</p>	<p>- Pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui lingkungan sosial yang mendukung prinsip "pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua".</p> <p>- Perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>12. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana.</p> <p>13. Meningkatkan sarana olah raga dan kesehatan yang memadai dalam menunjang proses pendidikan.</p>	<p>- Sosialisasi pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap bencana melalui berbagai media pendidikan.</p> <p>- Peningkatan sarana olah raga dan kesehatan di lingkungan lembaga pendidikan.</p>	<p>12. Memantapkan kualitas pendidikan dan ketrampilan kaum perempuan.</p> <p>13. Membentuk lembaga/ kelompok penanganan dan antisipasi bencana.</p> <p>14. Memantapkan peserta didik yang sehat dan berkualitas.</p>	<p>- Penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan bagi kaum perempuan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pelaku pendidikan lainnya.</p> <p>- Pembentukan lembaga/kelompok penanganan dan antisipasi bencana di lingkungan masyarakat.</p> <p>- Pengkondisian peserta didik yang sehat dan berkualitas, jasmani dan rohani pada setiap jenjang pendidikan.</p>	<p>12. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>13. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana.</p> <p>14. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan.</p>	<p>- Penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan.</p> <p>- Pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan.</p> <p>- Pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>MISI II: Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan</p>							
1. Meningkatkan ketahanan dan daya saing kebudayaan di DIY.	<p>a. Peletakan dasar-dasar regulasi ketahanan budaya</p> <p>b. Peletakan strategi dayasaing kebudayaan.</p>	1. Mewujudkan sistem pengembangan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh sistem informasi yang efisien dan mempunyai jaringan luas.	<p>a. Membangun kemitraan dan partisipasi yang sehat dan berkelanjutan antar stakeholders yang terlibat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan.</p> <p>b. Mewujudkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang sehat dan luhur.</p>	1. Terselenggaranya proses perkembangan budaya yang sehat dan terhormat di semua lapisan masyarakat yang ditopang oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan pusat-pusat pengembangan kebudayaan lainnya.	<p>a. Peningkatan jumlah, ragam, dan mutu pelaku dan kegiatan budaya yang berbasis masyarakat di seluruh Provinsi DIY.</p> <p>b. Mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat Provinsi DIY dalam proses pembangunan kebudayaan.</p> <p>c. Penyelenggaraan sistem pengelolaan budaya yang berbasis masyarakat yang terkait secara sinergis dengan pemerintah.</p>	1. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya.	<p>a. Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya.</p> <p>b. Memantapkan Provinsi DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya</p> <p>c. Mempertahankan masyarakat Yogya - karta yang cerdas, modern, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Memelihara dan merehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagai ikon warisan budaya masa lalu, termasuk revitalisasi peran Kraton sebagai salah satu Pusat Pengembangan Kebudayaan Yogyakarta dan motor penggerak kebudayaan rakyat.	<p>a. Pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan kebudayaan.</p> <p>b. Restorasi kebudayaan yang tanggap terhadap perubahan global baik formal maupun non formal, baik pemerintah, swasta dan masyarakat.</p> <p>c. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebudayaan.</p> <p>d. Perwujudan pusat-pusat penelitian, perpustakaan Jawa, dan pengembangan kebudayaan yang dapat menjangkau semua perkembangan budaya di masyarakat.</p>	2. Mewujudkan pengembangan dan pelestarian dan mengembalikan fungsi kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.	<p>a. Penyelenggaraan <i>event</i> kebudayaan yang dinamis, unik, berkelas dunia, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke DIY.</p> <p>b. Penyediaan dokumen teknis implementasi, dan sosialisasi, standarisasi pengelolaan basis data dan informasi kebudayaan daerah.</p>	2. Terlaksananya partisipasi secara penuh dan peningkatan kesadaran yang tinggi di semua lapisan masyarakat akan pentingnya kelestarian dan perlindungan kawasan dan cagar budaya.	<p>a. Terwujudkannya 'kantong-kantong' kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat.</p> <p>b. Memantapkan dan membangun kemitraan dan partisipasi dalam upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan.</p>	2. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh.	<p>a. Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat Provinsi DIY dalam proses pembangunan kebudayaan.</p> <p>b. Mempertahankan dan mengembangkan 'kantong-kantong' kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat.</p> <p>c. Mempertahankan Provinsi DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>e. Pemahaman terhadap nilai-nilai kebudayaan melalui internalisasi, sosialisasi, edukasi pada jalur pendidikan formal, keluarga, masyarakat maupun melalui jalur media massa.</p> <p>f. Pengembangan gaya hidup masyarakat Provinsi DIY yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas berdasarkan Pancasila.</p>		<p>c. Peningkatan upaya penghargaan pemerintah terhadap aktivis-aktivis pelestari, pengembang, dan pewaris budaya, termasuk di dalamnya mengidentifikasi dan mendaftarkan hak paten atas hasil karya budaya Yogyakarta.</p> <p>d. Peningkatan keberdayaan pencapaian gaya hidup yang menjunjung tinggi keluhuran budi dan nilai-nilai religiusitas.</p>				<p>d. Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam <i>event</i> budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Menciptakan iklim yang kondusif untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi yang berbasisan kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan kebudayaan yang menjangkau semua perkembangan budaya di masyarakat. b. Menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas berbasis budaya. c. Memanfaatkan teknologi informatika dalam dokumentasi, kampanye, promosi untuk memantapkan jejaring kebudayaan, dan meningkatkan kesadaran budaya masyarakat. d. Mewujudkan kerja sama yang sinergis antara pusat-pusat pengembangan budaya dengan sektor-sektor lain, khususnya industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 						

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI III:							
Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif							
1. Optimalisasi obyek wisata dan memfungsikan serta mengembangkan obyek wisata potensial.	<p>a. Rehabilitasi dan rekonstruksi obyek wisata.</p> <p>b. Fasilitasi dan membangun kawasan wisata berbasis budaya dan pelestarian lingkungan.</p> <p>c. Perintisan dan pengembangan destinasi pariwisata potensial.</p> <p>d. Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata.</p> <p>e. Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui jejaring dan kemitraan.</p>	1. Membangun perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata dan sektor pendukung.	<p>a. Peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukungnya.</p> <p>b. Pengembangan usaha pariwisata.</p> <p>c. Meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan dan pendukung pariwisata dalam pengembangan dan kelestarian obyek pariwisata dengan titik berat pada:</p>	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang didukung oleh lingkungan yang aman dan nyaman.	<p>a. Peningkatan iklim usaha kepariwisataan.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>c. Pengembangan pemasaran/promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan.</p> <p>d. Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata.</p>	1. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman.	<p>a. Fasilitasi wisata <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> (MICE).</p> <p>b. Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu.</p> <p>c. Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/ lembaga/asosiasi/ organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>f. Pengembangan pemasaran/promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan di dalam dan luar negeri.</p> <p>g. Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan pariwisata, pengembangan dan kelestarian obyek pariwisata. - Pengembangan pemberdayaan masyarakat. 		<p>e. Pemantapan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang kondusif.</p>		<p>d. Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan.</p> <p>e. Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pariwisata.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Mengembangkan inovasi produk wisata dan jenis produk pendukung pariwisata.	<p>a. Peningkatan sarana prasarana penunjang pariwisata (sektor perhubungan, perdagangan dan jasa, agrowisata dan industri kecil).</p> <p>b. Pengembangan produk pariwisata meliputi pengembangan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata.</p> <p>c. Pengembangan wisata edukasi dan terpadu antar sektor.</p>	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kerajinan pendukung kegiatan pariwisata seiring dengan adanya peningkatan modal terhadap UKM.	<p>a. Peningkatan industri kerajinan pendukung pariwisata dan fasilitasi permodalan bagi UKM.</p> <p>b. Meningkatnya promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan titik berat pada: Pengembangan pemasaran/promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan.</p>	2. Meningkatnya pengelolaan obyek wisata oleh masyarakat yang sinergis dan terintegrasi dengan pemerintah dan swasta.	<p>a. Fasilitasi dan pembinaan pada lembaga kepariwisataan.</p> <p>b. Peningkatan jejaring pariwisata.</p> <p>c. Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional dlm penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>d. Tersedianya infrastruktur dan fasilitas pendukung ODTW dari semua sektor baik yang difasilitasi pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan titik berat pada: Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung ODTW.</p>	2. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata.	<p>a. Pengembangan produk Pariwisata.</p> <p>b. Pengembangan pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>c. Pengembangan usaha pariwisata.</p> <p>d. Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di luar negeri dengan titik berat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata - Pengembangan informasi pasar wisatawan. - Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>c. Meningkatnya jejaring pariwisata dengan titik berat pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata. - Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi. 		<p>e. Meningkatnya kualitas SDM pendukung kegiatan pariwisata terkait dengan peningkatan pendidikan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan mutu pelayanan (sapta pesona) dengan titik berat pada Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM pariwisata.</p> <p>f. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan <i>event</i> kegiatan wisata.</p>		<p>e. Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif dengan titik berat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan. - Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>g. Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan pariwisata, pengembangan dan kelestarian obyek pariwisata.</p> <p>h. Meningkatnya peran seluruh lapisan masyarakat dalam ikut serta mempromosikan kegiatan pariwisata.</p> <p>i. Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata.</p>		<p>f. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata dengan titik berat pada: Peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung pariwisata.</p> <p>g. Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal, dengan titik berat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan pariwisata. - Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan kemitraan pariwisata.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>MISI IV: Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat</p>							
1. Membangun kesadaran sikap tanggap dan tanggung jawab masyarakat terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.	<p>a. Penguatan kepedulian masyarakat untuk meningkatkan ketahanan dan pelayanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.</p> <p>b. Penyebarluasan informasi di seluruh lapisan masyarakat.</p>	1. Membentuk kelembagaan lokal dan unit kelompok masyarakat yang peduli akan masalah kesejahteraan sosial yang aktif dan terhubung oleh jaringan kerja.	<p>a. Pemberdayaan dan upaya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok guna meningkatkan ketahanan dan pelayanan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.</p> <p>b. Penciptaan lingkungan masyarakat yang terhubung dalam jaringan sukarelawan.</p> <p>c. Peningkatan pengabdian kesejahteraan sosial.</p> <p>d. Perintisan jaminan sosial untuk masyarakat.</p>	1. Menyediakan sarana penanganan masalah kesejahteraan sosial didukung petugas dan relawan yang berkemampuan pada unit-unit kelompok peduli kesejahteraan sosial di masing-masing lingkungan masyarakat.	<p>a. Penyediaan unit-unit fasilitas kesejahteraan sosial untuk konseling.</p> <p>b. Peningkatan pelayanan dan koordinasi tindakan penanganan masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>c. Pendampingan petugas kesejahteraan yang profesional dan berkompeten dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.</p> <p>d. Pemantapan jaringan sosial untuk masyarakat.</p>	1. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial.	<p>a. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.</p> <p>b. Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>c. Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat.</p> <p>d. Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Membentuk masyarakat yang mempunyai wawasan dan perilaku hidup sehat, aktif mengelola sanitasi lingkungan yang didukung penyuluh dan petugas kesehatan yang semakin profesional dan berdedikasi.	<p>a. Peningkatan wawasan masyarakat akan budaya hidup sehat dan prinsip-prinsip pencegahan gangguan kesehatan melalui sosialisasi.</p> <p>b. Peningkatan komitmen dan profesionalisme para penyuluh dan petugas kesehatan melalui diklat.</p> <p>c. Peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.</p> <p>d. Fasilitasi sarana pendukung dan layanan kesehatan.</p>	2. Memperbaiki dan meratakan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan, baik dalam hal jarak jangkauan yang lebih dekat maupun biaya yang lebih murah khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah, masyarakat perdesaan terpencil (termasuk wilayah perbatasan), maupun masyarakat di lingkungan marginal kota.	<p>a. Peningkatan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh pelosok.</p> <p>b. Peningkatan profesionalisme sumberdaya kesehatan yang melayani masyarakat hingga ke pelosok-pelosok.</p> <p>c. Peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.</p>	2. Meningkatkan jumlah dan spesialisasi sumberdaya manusia di bidang pelayanan kesehatan, didukung penggunaan dan penerapan teknologi kesehatan yang terkini, serta perbaikan dalam sarana-prasarana pelayanan kesehatan.	<p>a. Peningkatan jumlah dan keahlian spesialisasi sumberdaya manusia di bidang kesehatan.</p> <p>b. Pemerataan distribusi tenaga profesional yang didukung pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi kesehatan yang terkini.</p> <p>c. Peningkatan kepedulian terhadap kesehatan reproduksi.</p>	2. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan.	<p>a. Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan.</p> <p>b. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik.</p> <p>c. Peningkatan wawasan masyarakat yang responsive terhadap penyakit menular.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Mengurangi pengangguran melalui penciptaan dan pertumbuhan wirasaha yang prospektif didukung peningkatan investasi sektor ekonomi modern dan didukung dengan koordinasi kebijakan bidang kependudukan yang komprehensif.	<p>a. Peningkatan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha dengan dukungan informasi peluang usaha.</p> <p>b. Peningkatan sarana permodalan.</p> <p>c. Peningkatan pelatihan ketrampilan.</p> <p>d. Penciptaan peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>e. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan.</p> <p>f. Perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja dan pengusaha.</p>	3. Menjalin kerjasama antar daerah untuk memperlancar transfer tenaga kerja antar daerah dan antar usaha sektor ekonomi untuk saling mencukupi kebutuhan tenaga kerja, serta aliran investasi.	<p>a. Peningkatan kegiatan usaha yang mendukung karakter wilayah sebagai pusat pendidikan dan pariwisata.</p> <p>b. Peningkatan dorongan berwirausaha bagi masyarakat.</p> <p>c. Pemantapan sistem informasi ketenagakerjaan.</p> <p>d. Terpeliharanya hubungan industrial.</p>	3. Meningkatnya kualitas, etos, dan produktivitas tenaga kerja didukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan menuju terwujudnya hubungan industrial yang lebih mutualistik, humanis, harmonis, dan progresif.	<p>a. Perluasan akses ketenagakerjaan di segala bidang.</p> <p>b. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.</p> <p>c. Peningkatan pengaturan, perlindungan, pengawasan, dan jaminan kerja.</p>	3. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya.	- Peningkatan potensi ketenagakerjaan yang memenuhi basis kultural, standarisasi, kompetensi, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional maupun internasional.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Membangun citra transmigrasi di masyarakat sebagai pilihan yang menjanjikan peluang peningkatan kesejahteraan rumah tangga dengan mekanisme pemindahan dan penempatan yang efektif dan tepat waktu.	<p>a. Peningkatan kualitas dan intensitas penyelenggaraan transmigrasi serta fasilitasi bagi transmigran.</p> <p>b. Penyebarluasan informasi melalui penyuluhan yang profesional.</p> <p>c. Penyusunan pola rekrutment dan pembekalan calon transmigran yang sistematis sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Penyiapan penempatan lokasi yang tepat.</p>	4. Membentuk kemandirian dalam penyelenggaraan transmigrasi berdasarkan kerjasama yang mutualistis dengan daerah-daerah penempatan yang memberikan jaminan dan peluang perbaikan ekonomi transmigran serta pembangunan sosial-ekonomi wilayah daerah penempatan.	<p>a. Penguatan kerjasama dan kemitraan antara daerah penempatan dengan daerah pengirim sesuai prinsip pemenuhan kebutuhan (<i>demand-supply</i>).</p> <p>b. Penguatan jaminan keberhasilan usaha dan peluang perbaikan ekonomi transmigran serta pembangunan sosial-ekonomi wilayah daerah penempatan.</p>	4. Meningkatnya minat transmigrasi secara swakarsa baik untuk bidang usaha budidaya tanaman, perikanan, industri, jasa, maupun tenaga kerja sektor konstruksi, diperkuat oleh pemerintah melalui dukungan modal material dan pelatihan ketrampilan usaha.	<p>a. Peningkatan minat dan motivasi penduduk untuk berpartisipasi dalam program transmigrasi secara swakarsa.</p> <p>b. Peningkatan pilihan kegiatan ekonomi transmigran yang beragam.</p> <p>c. Peningkatan pemberian bantuan subsidi dan fasilitas untuk bidang usaha budidaya tanaman, perikanan, industri, jasa, maupun tenaga kerja sektor konstruksi.</p> <p>d. Peningkatan peran pemerintah dengan dukungan modal material dan pelatihan ketrampilan usaha.</p>	4. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif.	- Pemenuhan pelayanan dan mekanisme perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui program transmigrasi yang transparan berlangsung secara teratur.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi.	- Pengembangan wawasan dan kesadaran kesetaraan gender di lapisan masyarakat, organisasi, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.	5. Mewadahi aspirasi perempuan dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan peran perempuan dalam kegiatan sosial, maupun ekonomi produktif, serta terbentuknya kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif.	a. Pengembangan aspirasi dan peran perempuan dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. b. Peningkatan kemampuan perempuan dalam mengenali dan memenuhi kebutuhan pengembangan dirinya. c. Peningkatan dukungan terbentuknya kelompok kegiatan sosial perempuan dan unit-unit usaha ekonomi produktif.	5. Mewujudkan kultur kesetaraan gender untuk mengatasi persoalannya dan berperan nyata dalam lingkungan masyarakatnya.	- Peningkatan kemandirian perempuan untuk mengatasi persoalannya, mensejahterakan dirinya (<i>self-help</i>) melalui pendidikan dan pelatihan di masyarakat.	5. Meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender.	- Peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Menyediakan pelayanan sosial dan ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi pendukung.	<p>a. Pemantapan tata ruang wilayah sebagai respon terhadap kebutuhan dinamika lokasi-lokasi peruntukan industri skala besar dan menengah, serta jenis-jenis industri prioritas.</p> <p>b. Penataan ruang bagi pertanian progresif, sistem agropolitan, permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan baru.</p> <p>c. Penataan ruang yang memadukan jaringan infrastruktur dan pelayanan sosial ekonomi wilayah.</p>	6. Memperkuat ekonomi masyarakat melalui investasi, membuka usaha ekonomi produktif pada lokasi industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.	<p>a. Penguatan industri kecil dan kerajinan rakyat yang memberi nilai tambah daya tarik wisata.</p> <p>b. Pengembangan budaya daerah dan menjadikan lokasi-lokasi industri sebagai kunjungan dan atraksi wisata.</p> <p>c. Pemanfaatan infrastruktur dan jaringan ekonomi sesuai dengan peruntukan dan prioritasnya.</p> <p>d. Pemantapan sistem jaringan transportasi yang sinergi inter dan antar moda.</p>	6. Mengintegrasikan ekonomi produktif serta pusat-pusat pertumbuhan baru dalam sistem jaring infrastruktur dan komunikasi untuk mempermudah transportasi input produksi dan pemasaran hasil produksi, serta terbentuknya kawasan agropolitan.	<p>a. Peningkatan peluang bagi industri kecil dan kerajinan rakyat terkait dengan sumber-sumber pemasaran regional, nasional, dan internasional.</p> <p>b. Pemantapan penyediaan infrastruktur publik yang selaras dengan pusat-pusat pertumbuhan baru.</p> <p>c. Pemanfaatan sumberdaya alam yang memperhatikan pelestarian lingkungan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.</p>	6. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat.	- Penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>d. Peningkatan pelayanan sistem transportasi wilayah melalui sinergitas antar moda guna mendukung perekonomian pendidikan dan pariwisata.</p> <p>e. Pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta pengembangan energi alternatif untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat.</p>		<p>e. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam.</p>				

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Pengembangan sistem industri yang ramah lingkungan di lingkup usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi berbasis keluarga, teknologi yang berkualitas, inovatif, dan jangkauan pemasaran yang lebih luas, sumberdaya manusia yang terampil, dengan motivasi usaha dan kewirausahaan yang kuat, didukung lembaga pelatihan dan pendidikan yang maju dan berkembang.	<p>a. Pengembangan unit-unit usaha industri kecil dan kerajinan rakyat yang potensial.</p> <p>b. Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya potensi industri kreatif.</p> <p>c. Peningkatan ketrampilan dan pemanfaatan secara nyata.</p> <p>d. Peningkatan penyiapan dan penggunaan bahan baku lokal.</p> <p>e. Peningkatan inovasi produk dan jangkauan pemasarannya.</p>	7. Meningkatkan komoditas produk industri di lingkup usaha, mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri kreatif yang khas dan orisinal, didukung lokasi-lokasi kegiatan industri yang berperan sebagai daya tarik kunjungan dan atraksi wisata daerah.	<p>a. Pemasarakatan peraturan dan penerapan tata ruang wilayah yang tanggap dini terhadap perkembangan dan dinamika sosial ekonomi di masa depan.</p> <p>b. Peningkatan peluang investasi disertai jaminan fasilitas dan kemudahan prosedur.</p> <p>c. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif untuk mendorong perekonomian rakyat.</p>	7. Meningkatkan komoditas, produk industri kecil, kerajinan rakyat dan industri kecil, koperasi yang menjangkau pasar lebih luas dan berkualitas, di tingkat regional, nasional, dan internasional.	<p>a. Akselerasi, optimalisasi, dan integrasi proses kegiatan sosial ekonomi, permukiman, dan industri kreatif dengan dinamika pembangunan tata-ruang, serta ketersediaan infrastruktur wilayah didukung pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.</p> <p>b. Mempertahankan dan mengembangkan peluang investasi.</p> <p>c. Perkuatan industri kreatif menuju pasar internasional.</p>	7. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (<i>craftmanship</i>) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi.	<p>a. Pemantapan budaya berkerajinan (<i>craftmanship</i>) didukung pemantapan standard mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif.</p> <p>b. Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>f. Pengembangan bidang industri kerajinan dan industri kreatif dengan melibatkan lembaga pendidikan dan profesional.</p> <p>g. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompeten baik dalam negeri maupun luar negeri.</p>		<p>d. Mempertahankan dan mengembangkan kerjasama kemitraan, baik dalam maupun luar negeri.</p>		<p>d. Perkuatan jejaring dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri.</p>		

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Peningkatan budidaya pertanian serta mengelola dan melindungi lahan-lahan subur pertanian dari tekanan alih fungsi pertanian ke non pertanian.	<p>a. Optimalisasi pusat-pusat perbenihan.</p> <p>b. Perlindungan lahan-lahan pertanian subur, produktif, dan beririgasi dari proses konversi ke non-pertanian.</p> <p>c. Peningkatan budidaya, produksi, produktifitas, dan mutu produk pertanian yang berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor.</p>	8. Membentuk sistem budidaya pertanian yang menjamin kebutuhan pangan penduduk serta berkembangnya jenis-jenis komoditas pertanian yang lebih teragamkan (diversifikasi), bernilai ekonomi lebih tinggi (komersial) serta kompetitif dari segi kualitas produknya termasuk produk pertanian lahan kota.	<p>a. Pemanfaatan benih unggul guna meningkatkan pendapatan petani.</p> <p>b. Mempertahankan lahan pertanian sebagai upaya meningkatkan produktifitas pertanian.</p> <p>c. Penganekaragaman jenis komoditas pertanian yang mempunyai nilai komersial dan menguntungkan.</p> <p>d. Peningkatan pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.</p>	8. Membentuk sikap petani yang berorientasi kemajuan dan keuntungan (petani <i>progressive</i>) serta mudah menerima pengenalan metode tanam, teknologi, maupun komoditas yang lebih maju.	<p>a. Peningkatan jiwa usaha, proressivitas dan adoptivitas petani dalam merespon permintaan dan peluang pasar didukung perbaikan infrastruktur dan permodalan.</p> <p>b. Mempertahankan lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian</p> <p>c. Pengembangan benih unggul menuju pasar dalam negeri.</p> <p>d. Perkuatan pembangunan industri pengolahan dan peningkatan keanekaragaman yang mempunyai nilai komersial dan menguntungkan.</p>	8. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan.	- Perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
9. Menumbuhkan unit-unit usaha dan sentra budidaya ikan; benih, konsumsi, dan ikan hias, disertai keragaman produksi, dan produktivitas perikanan.	<p>a. Penentuan dan pemantapan lokasi sentra-sentra pembibitan ikan, budidaya ikan hias dan ikan konsumsi.</p> <p>b. Pelatihan keahlian dan motivasi petani budidaya ikan air tawar, air laut, dan perikanan tangkap.</p> <p>c. Peningkatan pengolahan hasil laut dan konsumsi ikan di masyarakat.</p>	9. Meningkatkan konsumsi dan permintaan produk ikan dari dunia usaha dan masyarakat.	<p>a. Peningkatan keterampilan dan pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan.</p> <p>b. Peningkatan pemasaran dan tata niaga produk ikan.</p> <p>c. Penyebarluasan/ kampanye/sosialisasi mengkonsumsi ikan di masyarakat.</p> <p>d. Pengembangan budidaya ikan air tawar, air laut, dan peningkatan kemampuan petani perikanan tangkap.</p>	9. Meningkatnya produktivitas perikanan dan peningkatan kualitas sehingga memperluas jangkauan pemasaran produk perikanan ke pasar swalayan, supermarket, dan pasar luar daerah dan ekspor.	<p>a. Pengawasan standar kualitas, kesehatan produk, dan sanitasi kolam budidaya untuk memperluas dan meningkatkan jangkauan pemasaran.</p> <p>b. Pengembangan usaha pengolahan produk ikan.</p> <p>c. Pembudayaan gemar makan ikan.</p> <p>d. Perkuatan budidaya ikan air tawar, air laut, dan kemandirian nelayan perikanan tangkap.</p>	9. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan.	- Pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Menentukan wilayah prioritas pengembangan hutan berdasarkan berbagai fungsi, baik hutan konservasi, maupun hutan produksi, dan hutan untuk penyelamatan lingkungan.	<p>a. Penetapan kawasan hutan untuk berbagai fungsi pada unit-unit wilayah.</p> <p>b. Pembangunan hutan taman kota.</p> <p>c. Optimalisasi, rehabilitasi dan konservasi fungsi hutan untuk penyelamatan lingkungan bagi kepentingan kehidupan generasi mendatang.</p> <p>d. Peningkatan budidaya, produksi, produktifitas, dan mutu produk perkebunan mendukung peningkatan pendapatan petani.</p>	10. Menjaga dan melestarikan pertumbuhan tanaman hutan serta tersedianya produk hutan dan hasil ikutan hutan untuk kebutuhan dunia usaha dan rumah tangga serta terbentuknya kelompok-kelompok pelestari hutan.	<p>a. Peningkatan produksi hasil hutan.</p> <p>b. Pengoptimalisasikan pertumbuhan tegakan kawasan hutan melalui peran masyarakat secara terstruktur.</p> <p>c. Pemberian sosialisasi pelestarian hutan di lingkungan pendidikan dasar menengah.</p> <p>d. Pengelolaan dan pengembangan hutan taman kota.</p> <p>e. Pemanfaatan produksi perkebunan yang berorientasi pasar dalam negeri dan ekspor.</p>	10. Mewujudkan hutan yang berkembang dan lebih dinamis dengan flora dan fauna yang lebih variatif, serta fasilitas pendukung optimalisasi fungsi hutan dalam perbaikan kualitas lingkungan, kebersihan udara, dan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.	<p>a. Pengembangan, perluasan, dan pengayaan hutan untuk jenis-jenis flora dan fauna yang langka dan atraktif sebagai bagian penganekaragaman hayati.</p> <p>b. Perluasan pemanfaatan hutan untuk peningkatan pendapatan petani hutan melalui tanaman tegakan.</p> <p>c. Perluasan hutan taman kota sebagai paru-paru kota.</p> <p>d. Peningkatan produksi perkebunan.</p>	10. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.	<p>a. Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata.</p> <p>b. Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Memantapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya kelembagaan sosial, politik, ekonomi yang mantap serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban dan haknya.	<p>a. Menjalin komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam hubungan kerja antar lembaga pemerintahan baik vertikal maupun antar bidang.</p> <p>b. Peningkatan forum komunikasi dan saling tukar informasi.</p> <p>c. Penguatan komitmen dan kerjasama yang sinergi antar lembaga/bidang baik dalam daerah maupun antar daerah.</p>	11. Merumuskan peraturan dan ketentuan teknis kompetensi dalam pembagian urusan untuk mengurangi tumpang-tindih dan konflik kepentingan sebagai tindak lanjut otonomi pemerintahan daerah.	<p>a. Pengembangan komunikasi, integrasi sinkronisasi, dan sinergi antar lembaga pemerintah.</p> <p>b. Pengurangan tumpang-tindih kewenangan dan yurisdiksi serta konflik kepentingan antar daerah, antara daerah dan pusat, antar bidang, dan antar lembaga melalui peraturan dan ketentuan teknis kompetensi dan pembagian urusan.</p>	11. Menjalin kerjasama antar lembaga dilandasi kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pelayanan terbaik dan pencapaian rencana dan program pembangunan daerah.	<p>a. Penguatan pemahaman atas situasi nyata sistem dan etika birokrasi serta pemerintahan.</p> <p>b. Penguatan jalinan kerjasama antar lembaga dilandasi kompetensi dan komitmen yang tinggi.</p> <p>c. Peningkatan pelayanan terbaik dan pencapaian rencana dan program, dan mewujudkan keterpaduan multi sektor untuk merumuskan solusi dan alternatif pembangunan daerah.</p>	11. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.	<p>a. Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat dialogis untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan.</p> <p>b. Penanganan masalah pembangunan secara terpadu.</p> <p>c. Peningkatan reputasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat.</p> <p>d. Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.</p>

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>d. Peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan sumberdaya aparatur, dengan titik berat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem rekrutmen SDM Pemerintahan (PNS) sesuai dengan kebutuhan kerja dan berbasis keahlian secara berkelanjutan. - Sistem peningkatan kualitas SDM Pemerintahan (PNS) melalui diklat, kursus-kursus kepemimpinan dan upaya-upaya lainnya secara berkelanjutan. 		<p>c. Memantapkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dengan titik berat pada penguasaan teknologi informasi oleh seluruh jajaran pegawai pemerintahan sebagai basis utama pelayanan publik.</p> <p>d. Peningkatan dan pengembangan jejaring kemitraan antar <i>stakeholder</i>.</p>		<p>d. Perkuatan komunikasi, koordinasi dan sinergi dalam hubungan kerja antar lembaga pemerintahan baik vertikal maupun antar bidang.</p> <p>e. Perkuatan pengembangan kapasitas kelembagaan, otonomi daerah, pemerintahan umum, dan sumber daya aparatur.</p> <p>f. Perkuatan kinerja birokrasi pemerintahan yang pro bisnis untuk mendukung percepatan pengembangan dunia usaha.</p>		<p>e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional, dengan titik berat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya SDM Pemerintahan (PNS) yang profesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang keahliannya. - Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan (PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang prima. f. Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat.

TAHAP I	PRIORITAS TAHAP I	TAHAP II	PRIORITAS TAHAP II	TAHAP III	PRIORITAS TAHAP III	TAHAP IV	PRIORITAS TAHAP IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>e. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.</p> <p>f. Penciptaan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat.</p> <p>g. Pemahaman manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.</p>		<p>e. Peningkatan kapasitas kelembagaan, otonomi daerah, pemerintahan umum, dan sumberdaya aparatur, dengan titik berat pada peningkatan kualitas SDM Pemerintahan (PNS) untuk mencapai profesionalisme kinerja pegawai guna mendukung layanan publik yang prima.</p> <p>f. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum.</p> <p>g. Peningkatan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.</p>		<p>g. Perkuatan pelayanan publik lewat pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>h. Perkuatan kepastian hukum, ketertiban dan keamanan masyarakat.</p> <p>i. Perkuatan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.</p>		<p>g. Membudayanya manajemen penanggulangan dan pencegahan bencana.</p>

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Provinsi DIY merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (lima tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan).

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi *Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*, sangat tergantung pada peran aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Selain itu perlu didukung oleh komitmen dari kepemimpinan daerah yang akuntabel, kapabel, demokratis dan berkualitas, konsistensi kebijakan pemerintahan daerah, ketatapemerintahan yang baik, keberpihakan kepada masyarakat, keterlibatan dan peran serta masyarakat secara langsung dan nyata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X